BADAN POM



LAPORAN
KINERJA INTERIM

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

TRIWULAN I

2025





www.bandung.pom.go.id

KATA PENGANTAR
Kepala Balai Besar POM di Bandung

"Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung selaku Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI senantiasa selalu berkomitmen menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat"

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2025, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka "menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat".

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAPKIN Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 disusun pada akhir triwulan I pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua tujuan utama yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

(1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di triwulan berikutnya.

Bandung, 30 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Bandung,

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan /Ikhtisar Eksekutif

Highlight Kinerja

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

2.5 Metode Pengukuran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

3.1.2 Sasaran KegiatanKe-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

3.1.3 Sasaran KegiatanKe-3: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

3.1.4 Sasaran KegiatanKe-4: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

3.1.5 Sasaran KegiatanKe-5: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

3.1.6 Sasaran KegiatanKe-6: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

3.1.7 Sasaran KegiatanKe-7: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Layanan Publik UPT yang Prima .....

3.1.9 Sasaran KegiatanKe-9: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan I tahun 2025. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama triwulan I tahun 2025 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

SASARAN KEGIATAN

- Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat
- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat
- Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat
- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
- Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
- Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima
- Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu "Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat" diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan sebanyak 6 (enam) indikator, yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 115,94%, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,65%, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,65%, Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 122,69%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 116,84%, dan Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 119,79%. 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 106,53%. 3 (tiga) indikator kategori Baik yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100,00%, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 96,14%, dan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,95%. Serta 1 (satu) indikator dihitung pada akhir tahun yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Sasaran kegiatan kedua yaitu "Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi" diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 129,91%.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu "Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat" diperoleh capaian 1 (satu) Indikator dengan kategori Sangat Baik, yaitu Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 103,80%.

Sasaran kegiatan keempat yaitu "Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat" diperoleh capaan 1 (satu) indikator dengan kategori Tidak dapat disimpulkan yaitu Jumlah desa pangan aman sebesar 133,33%. 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

sebesar 100,28%. Dan 2 (dua) indikator dengan kategori Baik yaitu Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman sebesar 100,00% dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan kelima yaitu "Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu" diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 111,11%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 299,29%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu "Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif" diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu "Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima" diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT diukur pada akhir tahun.

Sasaran kegiatan kesembilan yaitu "Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal" diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung, Nilai AKIP Balai Besar di Bandung, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung yang diukur pada akhir tahun.

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp66.390.943.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp36.886.313.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 dengan presentase 12.72% yaitu sebesar Rp4.690.579.300,-. Dari Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan dengan Tidak Efisien karena adanya Efisiensi Anggaran. Meskipun demikian pada triwulan berikutnya di tahun 2025 akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

HIGHLIGHT KINERJA

1. Balai Besar POM di Bandung telah mendapatkan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 20 Desember 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

2. Sebagai Upaya pemberantasan Korupsi, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi Sucofindo Iternational Certification Service Nomor. 5932/SERCO-XI/VP/2024 tanggal 20 November 2024. Selain itu Balai Besar POM di Bandung juga secara aktif memberikan informasi Anti Korupsi melalui Media Sosial dan Subsite Balai Besar POM di Bandung.



IDSurvey

SUCOFINDO

SURAT REKOMENDASI
Nomor: 5932/SERCO-XI/VP/2024

SUCOFINDO SIES ISO 37001

Menyatakan bahwa
Declare that

Balai Besar POM di Bandung
Jl. Pasteur No. 25, Bandung, Jawa Barat 40171, Indonesia

telah memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi
has maintained quality management system that comply with

SNI ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :
Pengawasan Obat dan Makanan pada Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung
Drug and Food Control of Provincial Office in Bandung

KAN Komite Akreditasi Nasional

Surat ini diberikan berdasarkan hasil kegiatan Audit Surveilan bahwa organisasi dinyatakan dapat melanjutkan penggunaan sertifikat No. **SAB 00144**. Surat ini bukan sebagai pengganti sertifikat dan berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*This letter is given based on the results of the Surveillance Audit activities that the organization is declared to be able to continue the use of certificate No. **SAB 00144**. This letter is not a substitute for a certificate and is valid provided that the organization always meets the criteria as laid down by **SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES**. Thus this letter of recomendation is issued to be used properly.*

Jakarta, 20 November 2024

Dian Indrawaty
Kepala SBU Sertifikasi & Ecoframework
PT SUCOFINDO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

3. Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Bandung Nomor B.PI.06.06.7.11.24.642 tanggal 28 November 2024, Nilai PMP ZI BBPOM di Bandung adalah 91,24 sehingga dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM.

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,54	4,00	7,54	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,13	2,50	5,63	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,45	5,00	9,45	**MS**
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	4,45	9,45	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,82	7,50	14,32	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,96	4,59	9,55	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**55,92**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,89	
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,93	
TOTAL HASIL						**35,31**	
NILAI PMPZI						**91,24**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

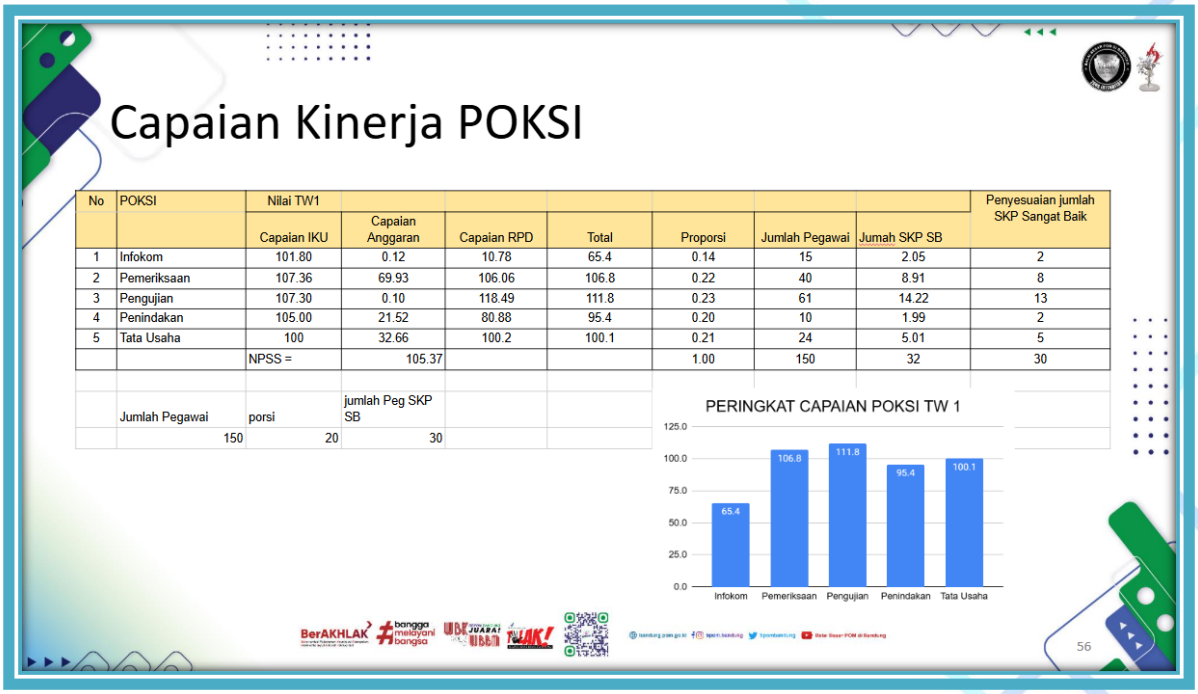
4. Balai Besar POM di Bandung telah membuat Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja melalui Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai dengan pengelolaan Anggaran.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

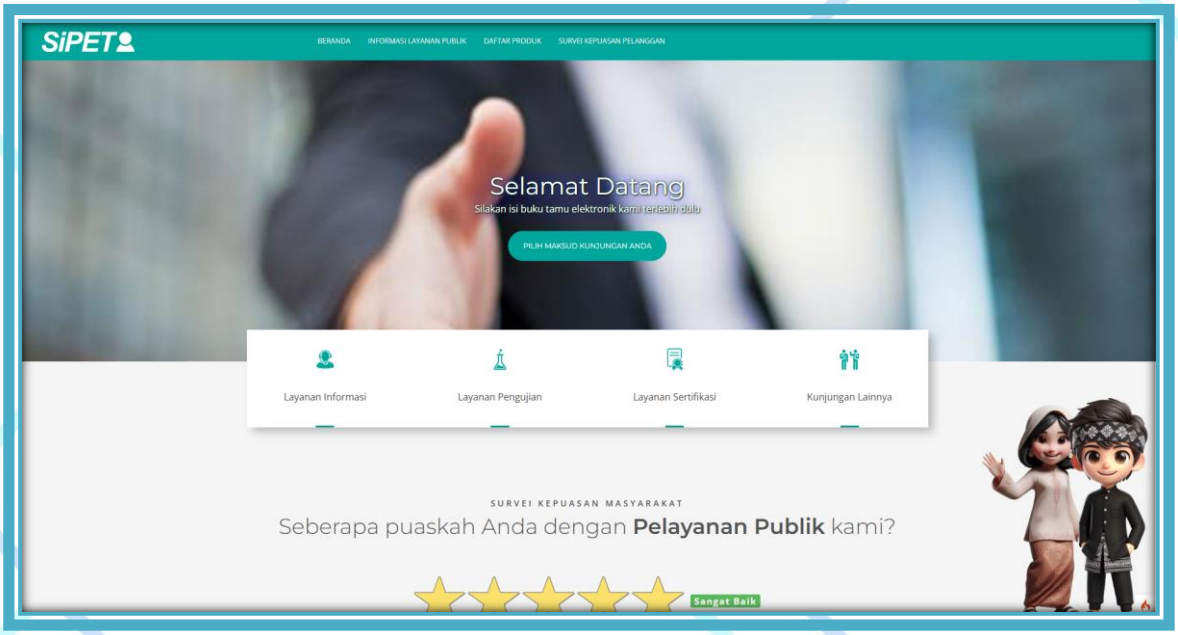
5. Balai Besar POM di Bandung telah membuat inovasi penerapan Reward and Punishment pengukuran kinerja Pegawai untuk menentukan proporsi predikat kinerja Pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.



No	POKSI	Nilai TW1							Penyesuaian jumlah SKP Sangat Baik
		Capaian IKU	Capaian Anggaran	Capaian RPD	Total	Proporsi	Jumlah Pegawai	Jumah SKP SB	
1	Infokom	101.80	0.12	10.78	65.4	0.14	15	2.05	2
2	Pemeriksaan	107.36	69.93	106.06	106.8	0.22	40	8.91	8
3	Pengujian	107.30	0.10	118.49	111.8	0.23	61	14.22	13
4	Penindakan	105.00	21.52	80.88	95.4	0.20	10	1.99	2
5	Tata Usaha	100	32.66	100.2	100.1	0.21	24	5.01	5
		NPSS =	105.37			1.00	150	32	30

Jumlah Pegawai	porsi	jumlah Peg SKP SB
150	20	30

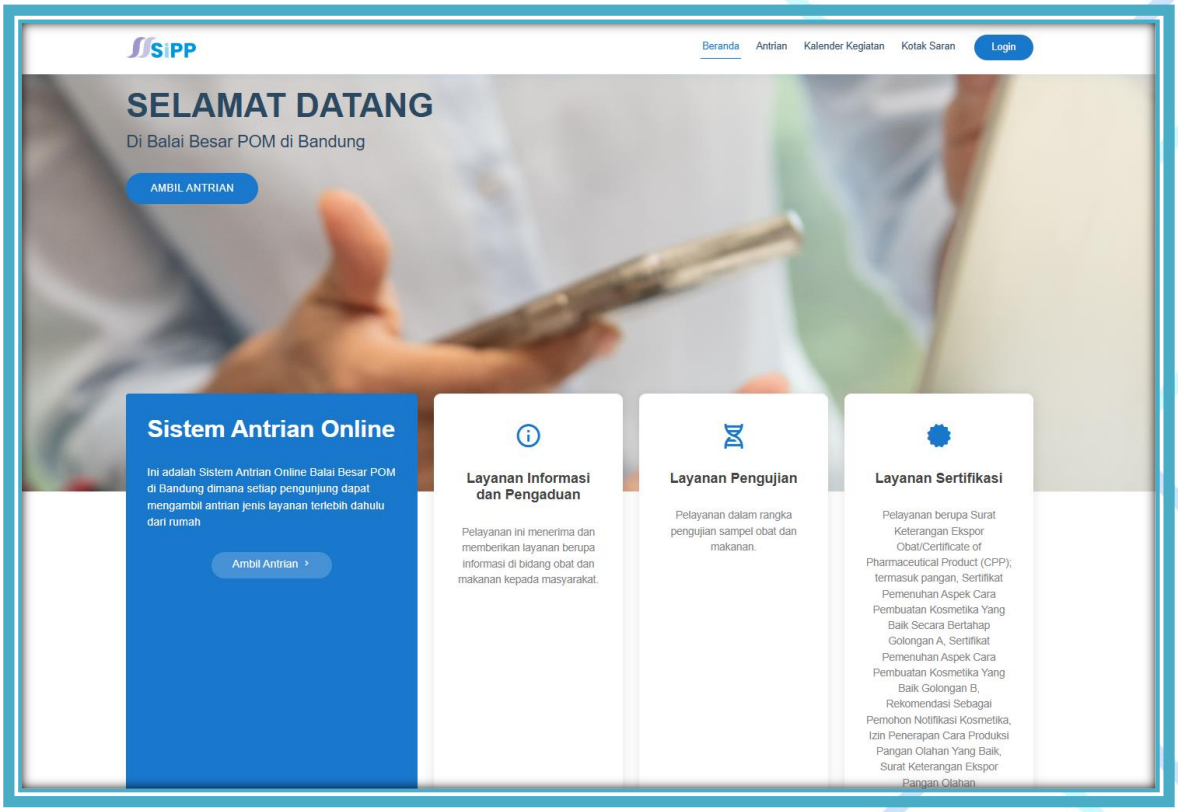
6. Sebagai Upaya meningkatkan Pelayanan Publik BBPOM di Bandung membuat aplikasi pencatatan buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk Layanan di ULPK BBPOM di Bandung.



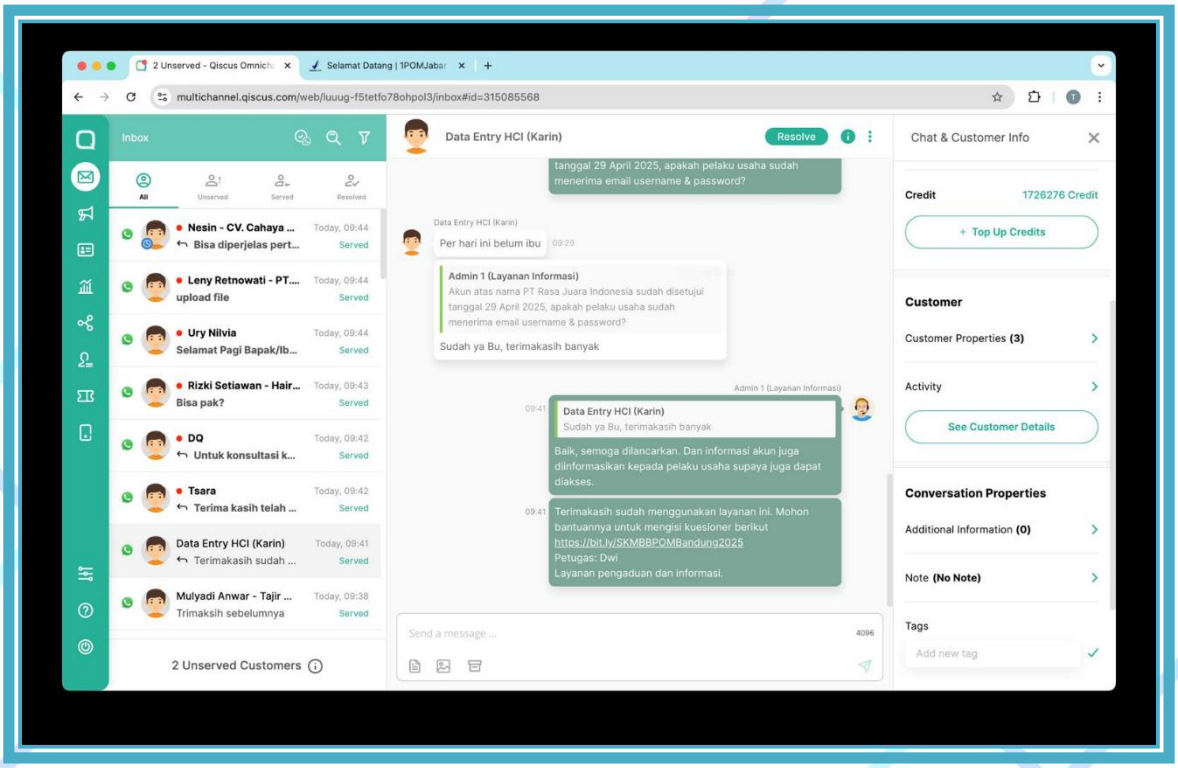
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

7. Sebagai Upaya meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Bandung hadir pada setiap Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan menerapkan sistem Antrian Online untuk pendataan Pelanggan di MPP.



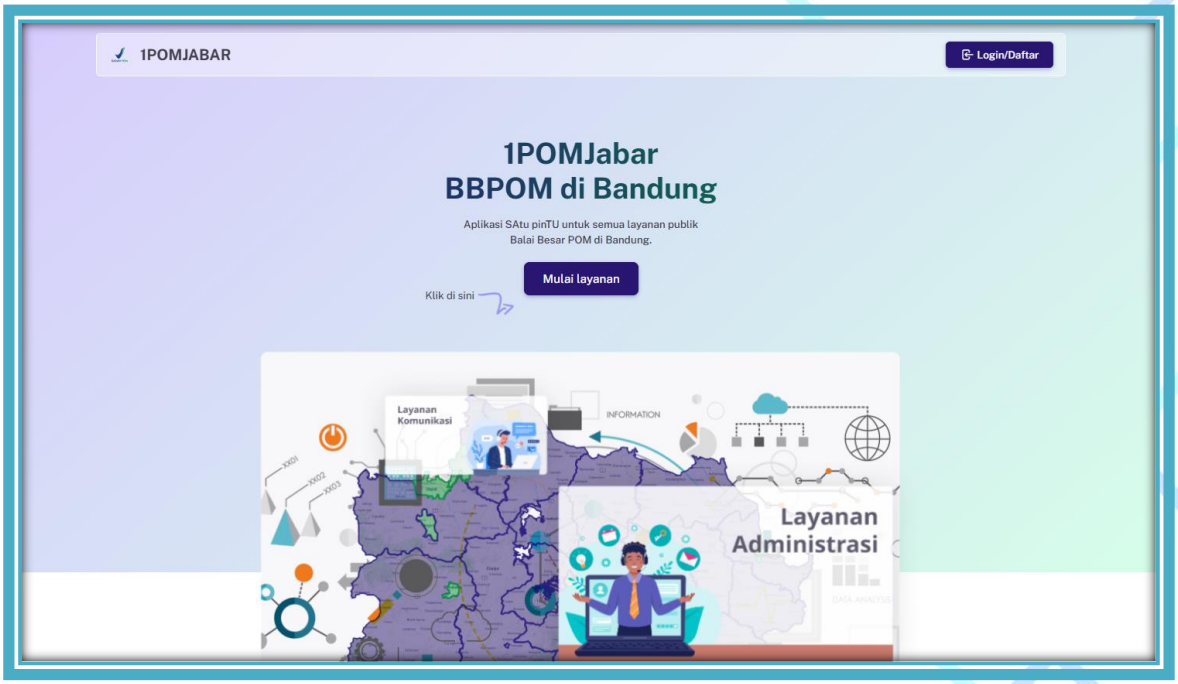
8. Layanan Online BBPOM di Bandung melalui aplikasi Whatsapp satu nomor 08119900533 untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi di BBPOM di Bandung.



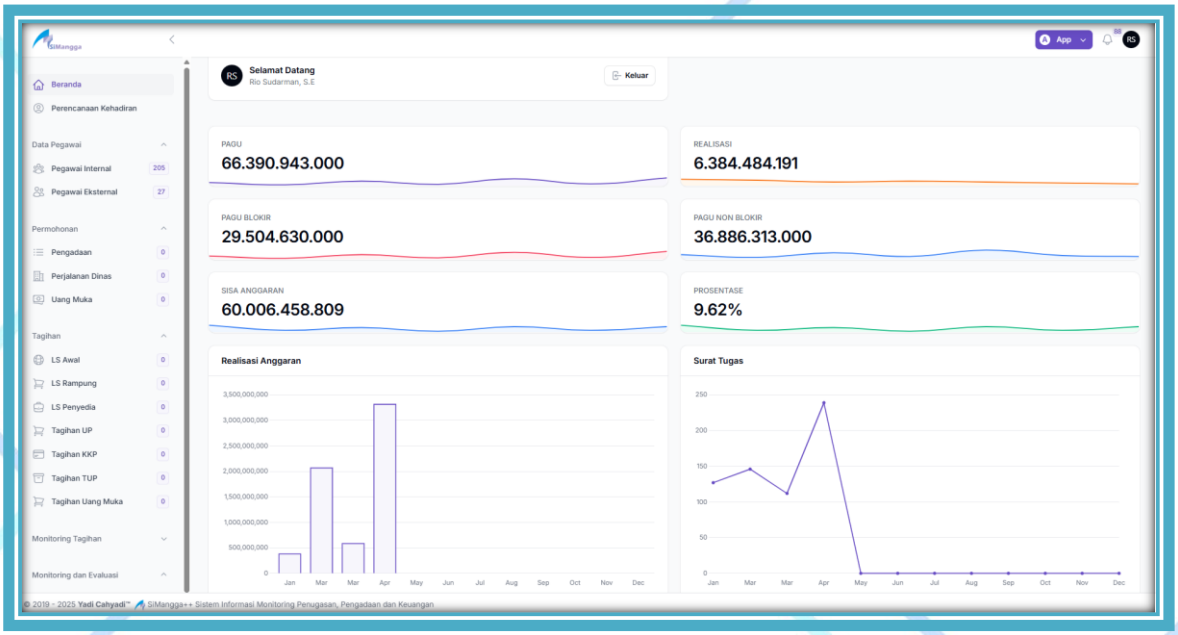
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

9. Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi Layanan satu pintu BBPOM di Bandung untuk menjangkau seluruh pelanggan dan sarana dalam pengawasan obat dan makanan.



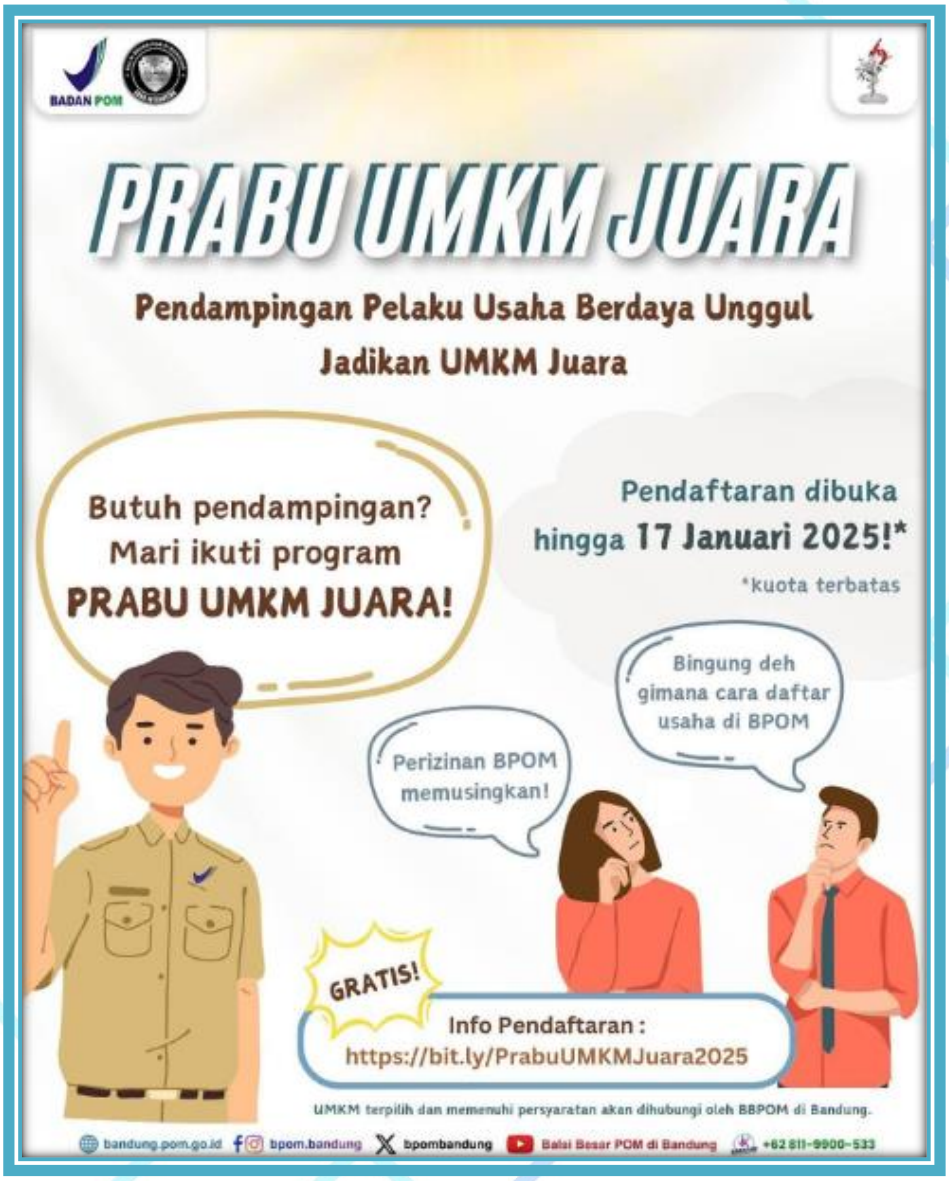
10. Dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel, Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan Keuangan) untuk mempermudah proses pengadaan dan Keuangan di BBPOM di Bandung sejak Tahun 2019 sehingga proses pertanggungjawaban lebih akuntabel, efektif, dan efisien.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

11. Balai Besar POM di Bandung menggelar pendampingan UMKM melalui program Prabu UMKM Juara sebagai Upaya untuk memfasilitasi UMKM Obat dan Makanan di Jawa Barat mendapatkan pendampingan dan izin edar.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

12. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat No. QSC 01806 dari Sucofindo Iternational Certification Service yang berlaku dari tanggal 18 November 2024 hingga 17 November 2027.



IDSurvey

SUCOFINDO

CERTIFICATE

Certificate No. QSC 01806

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi
has implemented quality management system that comply with

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan
Quality Management Systems - Requirements

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
Drug and Food Control Management at the Indonesian Food and Drug Authority.

KODE SEKTOR/SECTOR CODE: 34, 36

Lokasi audit sertifikasi tercantum dalam Lampiran – 1 s.d. 12
The audite location of certification is described in Appendix – 1 until 12

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus diperagakan/diperbanyak bersamaan dengan Lampiran - 1 s.d. 12
This certificate must be displayed/reproduced in conjunction with Appendix - 1 until 12

Dian Indrawaty
Vice President

IAF KAN

Sertifikat ini berlaku dari 18/11/2024 sampai 17/11/2027
This certificate is valid from 2024/11/18 until 2027/11/17

01-Rev.00

5051322

SCI-2023A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

13. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan ISO 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-173-IDN yang berlaku dari tanggal 3 Januari 2022 hingga 5 September 2026.



ilac-MRA

KAN
Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-173-IDN

Ditetapkan tanggal : 3 Januari 2022

Diberikan kepada

Berlaku hingga : 5 September 2026

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

di

Jl. Pasteur No. 25, Bandung
Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc

KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

www.bandung.pom.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Isu Strategis

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Bandung bulan Januari s.d. Maret atau Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2025 dan tahun pertama dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 6 (enam) tahun kedepan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain : 1) aspek kesehatan-penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans, dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; 2) aspek sosial-perubahan demografi dan epidemiologi yang meningkatkan tren kebutuhan masyarakat dalam penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan serta perubahan pola penyakit, yang memerlukan respon cepat, efektif dan efisien; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan, sehingga dapat menghasil produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan bermanfaat yang dapat bersaing dalam dinamika pasar yang dinamis; 4) aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, terutama pelanggaran di media online/e-commerce dan kejahatan siber, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi-perkembangan teknologi yang akseleratif khususnya dibidang bioteknologi dan nanoteknologi yang memberikan paradigma baru dan

www.bandung.pom.go.id

melakukan inovasi pengembangan produk baru, yang memerlukan peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi terutama untuk menjamin keamanan produk yang beredar; dan 6) aspek lingkungan – Isu lingkungan dan keberlajutan mendorong tuntutan pasar agar produk yang produksi dan diedarkan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya perubahan regulasi, standar dan persyaratan dalam pengawasannya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makananpenataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional

www.bandung.pom.go.id

tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21(dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 21 (dua puluh satu); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 34 (tiga puluh empat).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

www.bandung.pom.go.id

i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

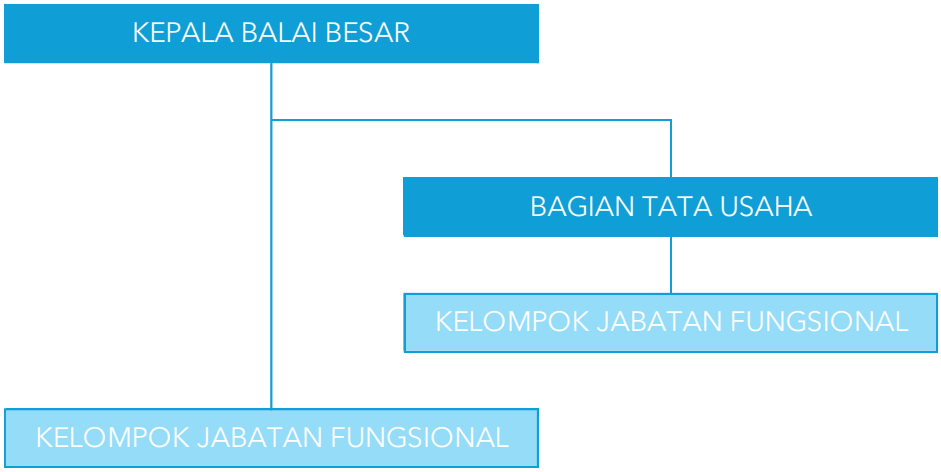
TABEL 1.1
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi 11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan

www.bandung.pom.go.id

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.



Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung

1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2025 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperluakan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementrian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal.

Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di bandung, untuk meningkatkan efektfitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

www.bandung.pom.go.id

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Tatakelola Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m2. Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Tatakelola sarana prasarana dilakukan dengan digitalisasi dan optimalisasi Pengelolaan BMN untuk Efisiensi Anggaran, efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui optimalisasi Produk Dalam Negeri (PDN), digitalisasi dan modernisasi Kearsipan untuk mengurangi biaya operasional, dan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja BBPOM di Bandung

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu,laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar

www.bandung.pom.go.id

pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2023, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap

www.bandung.pom.go.id

penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

   Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

   a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
   b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususunya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

   Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

   a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
   b. tingkat maturitas
   c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
   d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
   e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
   f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar

www.bandung.pom.go.id

g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan
i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
j. g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
k. h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
a. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
l. Standar kemampuan Laboratorium
m. j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi
n. standar kompetensi
o. k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
p. l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka
q. pelaporan KTD/ESO
r. m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan
s. Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
t. n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

   Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

   BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

www.bandung.pom.go.id

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efekif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementrian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
   b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
   c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
   b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
   c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
   d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
   b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

www.bandung.pom.go.id

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya.

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri

www.bandung.pom.go.id

yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan
mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional.

AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

www.bandung.pom.go.id

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat

www.bandung.pom.go.id

dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

www.bandung.pom.go.id

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan

www.bandung.pom.go.id

Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

www.bandung.pom.go.id

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
2.5 Metode Pengukuran

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa

www.bandung.pom.go.id

pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 Tahap Pertama yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Etologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kesinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2025-2029 yaitu: –

“"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional..

Visi Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Bandung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Bandung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar

www.bandung.pom.go.id

memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Bandung mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Bandung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Bandung menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Bandung berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi Presiden. Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

www.bandung.pom.go.id

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
5. pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya uang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang

www.bandung.pom.go.id

kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat

   Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat

   Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif,

www.bandung.pom.go.id

dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

   Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

   Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

8. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima

   Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

   Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

www.bandung.pom.go.id

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.1 berikut:

TABEL 2.1.1
SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	88.00	89.75	91.50	93.25
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	100	100	100	100
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	90	91	93	94

www.bandung.pom.go.id

8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	93.00	94.25	95.50	96.75
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	85.68	88.08	90.48	92.28
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	63	68	71	75
SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	87.81	88.68	89.55	90.42
15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	23	24	26
16. Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5

www.bandung.pom.go.id

SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
18.Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
19.Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	74	76	78	80
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif					
20.Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	91	92	93	94
SK 8. Layanan Publik UPT yang Prima					
21.Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel					
22.Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
23.Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
24.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5	5	5
25.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	3	3.05	3.1	3.15

www.bandung.pom.go.id

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.8A.09.24.605 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2.1
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94
		15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17
		16. Jumlah desa pangan aman	6
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	85.0

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90
8.	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5
		22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10
		23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95

www.bandung.pom.go.id

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RKT Tahun 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 66.390.943.000,-.

Pada tanggal 2 Desember 2024 ditetapkan DIPA Balai Besar POM di Bandung menjadi Rp. 66.390.943.000,-.

TABEL 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94
		15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17
		16. Jumlah desa pangan aman	6
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	85.0

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90
8.	Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5
		22. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10
		23. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		24. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95

Kegiatan :	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp.46.287.148.000,-
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.20.103.795.000,-

www.bandung.pom.go.id

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4.1 berikut:

TABEL 2.4.1

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	1.492.536.000
	2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26												26.00	99.200.000
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	405.173.200
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.112.800
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	155.282.000
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	64.683.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	320.563.000
	8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	305.724.000
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	642.279.000
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	417.745.000
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	44.945.000
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	0.00	4.80	11.00	17.50	23.80	30.00	36.50	42.90	49.00	52.40	55.00	57.00	58.922.000
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	81.7			79.00	79.00	79.00	80.00	80.00	80.00	81.00	81.00	81.00	81.70	12.603.107.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kemampuan Laboratorium														
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22.383.776.000
	15. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00	10.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	60.00	70.00	85.00	17.00	558.912.000
	16. Jumlah desa pangan aman	6	0.00	10.00	15.00	20.00	40.00	45.00	60.00	75.00	80.00	90.00	95.00	6.00	929.917.000
	17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00	10.00	20.00	25.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	1.00	166.002.000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	0.00	10.00	15.00	20.00	30.00	40.00	45.00	50.00	65.00	70.00	75.00	85.00	109.594.000
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	14.00	16.00	17.00	18.00	25.00	26.00	28.00	35.00	40.00	50.00	54.00	72.00	866.166.000

www.bandung.pom.go.id

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) *(menggunakan koma dan tanpa satuan%)*												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
di wilayah kerja UPT															
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	283.012.000
Layanan Publik UPT yang Prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	829.727.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	22. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5												91.50	20.247.184.000
	23. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10												83.10	3.084.740.000
	24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5												5.00	100.140.000
	25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95												2.95	159.501.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya

www.bandung.pom.go.id

dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM, dengan rincian sebagai berikut

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\ X\ 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%\ Capaian = \frac{1 + (1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}}\ X\ 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5.1

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
X >110%	100% < x ≤ 110%	90% < x ≤ 100%	60% ≤ x ≤ 90%	< 60%

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$\text{NP} = \sum\text{NSS}/\sum\text{SS}$$

www.bandung.pom.go.id

Keterangan :

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{NPSS} = \sum \text{NP} / \sum \text{P}$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan peredikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:.

TABEL 2.5.2

KRITERIA PENCAPAIAN NPSS

				
Istimewa	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
>100%	90 ≤ NPSS ≤ 100	70 ≤ NPSS < 90	50 ≤ NPSS < 70	< 50

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

www.bandung.pom.go.id

TABEL 2.5.3

KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

www.bandung.pom.go.id

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IE} = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Rencana Capaian Output}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.5.4

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

www.bandung.pom.go.id

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
3.3 Realisasi anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2025 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Triwulan 1 tahun 2025 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	107,52	SANGAT BAIK	
2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI	110,00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
3. MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	103,80	SANGAT BAIK	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT	102,57	SANGAT BAIK	
5. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU	110,00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
6. TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT	110,00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
7. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF	100,00	BAIK	
8. LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	-	DIUKUR MULAI TRIWULAN II	
9. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL	-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN	

www.bandung.pom.go.id

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di bawah ini:

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecuali*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	100.00	115.94	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00	-	-	-	-
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	BAIK
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.00	81.72	96.14	BAIK
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00	93.75	106.53	BAIK
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	98.15	122.69	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	90.79	98.95	BAIK
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	99.31	116.84	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	100.00	119.79	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				107,52	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12.Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	11.00	14.29	129.91	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13.Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	79.00	82.00	103.80	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				103.80	SANGAT BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14.Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	87.18	100.28	SANGAT BAIK
		15.Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20.00	20.00	100.00	BAIK
		16.Jumlah desa pangan aman	6	15.00	20.00	133.33	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		17.Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20.00	20.00	100.00	BAIK

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				102,57	SANGAT BAIK
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.00	15.00	16.67	111.11	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	17.00	50.88	299.29	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				110.00	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
7.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00	50.00	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				100.00	BAIK
8.	Layanan Publik UPT	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-	-	-	-

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%) Kecual i*	TARGET TW I (%)	REALISASI TW I (%)	CAPAIAN TERHADAP TARGET TW I (%)	KRITERIA CAPAIAN
	yang Prima	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR MULAI TW II
9.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22.Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-	-	-	-
		23.Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.10	-	-	-	-
		24.Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-	-	-	-
		25.Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-	-	-	-
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN				-	DIUKUR PADA AKHIR TAHUN
NILAI KINERJA ORGANISASI						106,27	ISTIMEWA

Pada triwulan I tahun 2025, terdapat dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, lima (5) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, satu (1) pencapaian dengan kriteria Cukup, serta dua (2) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada triwulan II dan akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

:

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-1 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 11 (sebelas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kesebelas indikator tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:

a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran adalah 7 (tujuh) indikator, sehingga diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **107,52%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

TABEL 3.1.3
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	100,00%	115,94%	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0,00%	0,00%	0,00%	Diukur pada Akhir Tahun	-

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	Baik	
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	81,72%	96,14%	Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00%	93,75%	106,53%	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa	80,00%	98,15%	122,69%	Tidak Dapat Disimpulkan	

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75%	90,79%	98,95%	Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	99,31%	116,84%	Tidak Dapat Disimpulkan	
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	100,00%	119,79%	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			107,52%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

   Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

   Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

www.bandung.pom.go.id

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
   30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),
   Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Target sampel,
   2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
   3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
   Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Renlak periode/waktu sampling,
   2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
   20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
   Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
   20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total

www.bandung.pom.go.id

target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang

www.bandung.pom.go.id

ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
   a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2
      Keterangan:
      a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
      a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
   b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
   d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
      Mencakup penentuan kesimpulan:
      1. Penandaan
      2. Pengujian
      3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
   e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
   a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2
      Keterangan:

www.bandung.pom.go.id

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%.

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
2. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

www.bandung.pom.go.id

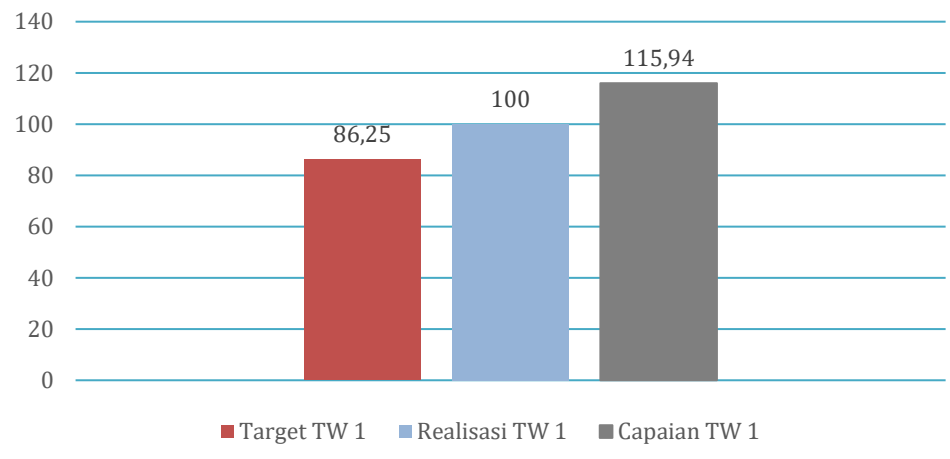
TABEL 3.1.4
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	100,00%	115,94%	Tidak Dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,25%. Seluruh sampel sediaan farmasi telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **115,94%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Grafik 3.1.1
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



www.bandung.pom.go.id

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,25%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 115,94% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.5
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25%	100,00%	115,94%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Adanya revisi target pada triwulan I karena efisiensi anggaran, sehingga sampel sediaan farmasi yang disampling dan diuji Balai Besar POM di Bandung masih sangat rendah yaitu sebesar 6,63% (117 sampel dari target 1766 sampel). Seluruh sampel sediaan farmasi yang diuji Balai Besar POM di Bandung yang berasal dari anggota Balai Regional Semarang sebesar 7,49% (162 sampel dari 2164 sampel). Jadi total keseluruhan sampel sediaan farmasi pada triwulan I dapat diuji sesuai pedoman sampling (parameter uji kritis dan timeline) yang telah ditetapkan.
2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2025 dan waktu pelaksanaan sampling dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

www.bandung.pom.go.id

3. Adanya aplikasi internal (Appsheet) pada pelaporan sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
4. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.
5. Pengambilan contoh sampel sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.
6. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel sediaan farmasi

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel sediaan farmasi untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Adanya efisiensi anggaran sehingga sampel yang disampling dan diuji masih sangat sedikit sehingga target kinerja bisa tercapai.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
3. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung

www.bandung.pom.go.id

pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.6
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115,94%	6,80%	17,06%	16,06%	Tidak Efisien

www.bandung.pom.go.id

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

2. PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan

www.bandung.pom.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%.

Keterangan:

A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Tahun 2025 adalah 26% diukur pada Akhir Tahun.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai

www.bandung.pom.go.id

Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

   Cara Perhitungan :(A1 + A2) /2

   A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B. Kesesuaian Parameter Uji

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%.

www.bandung.pom.go.id

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%. Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : ((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%.

TABEL 3.1.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang	85,00%	100,00%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	

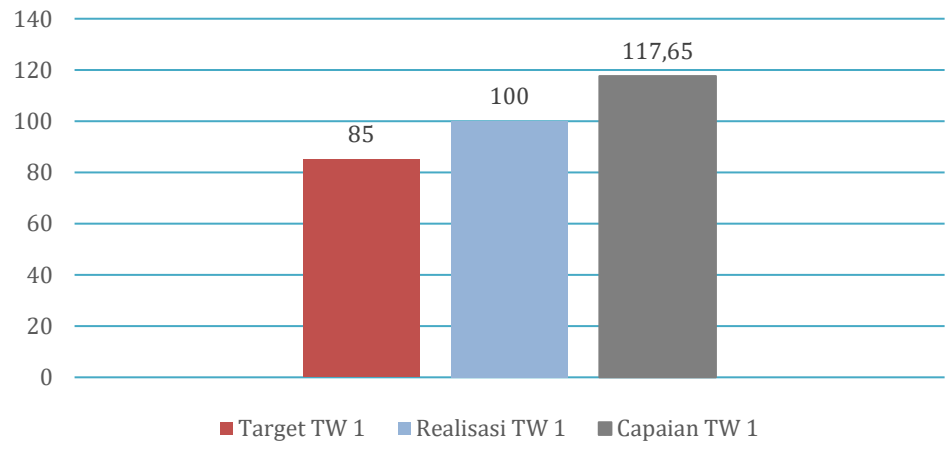
www.bandung.pom.go.id

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel pangan olahan telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 29 sampel Pangan Olahan telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 28 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (Kadar Benzoat). Terdapat penundaan pengujian (clock off) terhadap sampel yang disampling di bulan Januari dan Februari karena adanya kerusakan pada alat ICPMS. Mekanisme clock off mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 100 Tahun 2025 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tindak lanjut berupa perbaikan alat telah dilakukan sehingga alat berfungsi kembali dan pengujian sampel dapat dilanjutkan (clock on). Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi timeline yang ditetapkan. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100,00%. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar 117,65% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



www.bandung.pom.go.id

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 117,65% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.8
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada jumlah sampel yang disampling dan diuji berkurang dari target yang telah ditetapkan.
2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2025.
3. Renlak disusun dengan tepat disesuaikan dengan kondisi dan waktu pelaksanaan sampling dilakukan sesuai jadwal.
4. Penyusunan anggaran yang tepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
5. Adanya aplikasi internal (Appsheet) yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut .
6. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.

www.bandung.pom.go.id

7. Pengambilan contoh sampel Makanan yang dilakukan oleh BBPOM diBandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan.
8. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel produk pangan olahan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan pangan olahan untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
4. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah

www.bandung.pom.go.id

ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.9
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	117,65%	7,72%	15,25%	14,25%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan rumus = Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar / Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM x 100%.

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

www.bandung.pom.go.id

c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
    - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
    - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
    - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
    - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

TABEL 3.1.10
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR"
TRIWULAN I TAHUN 2025

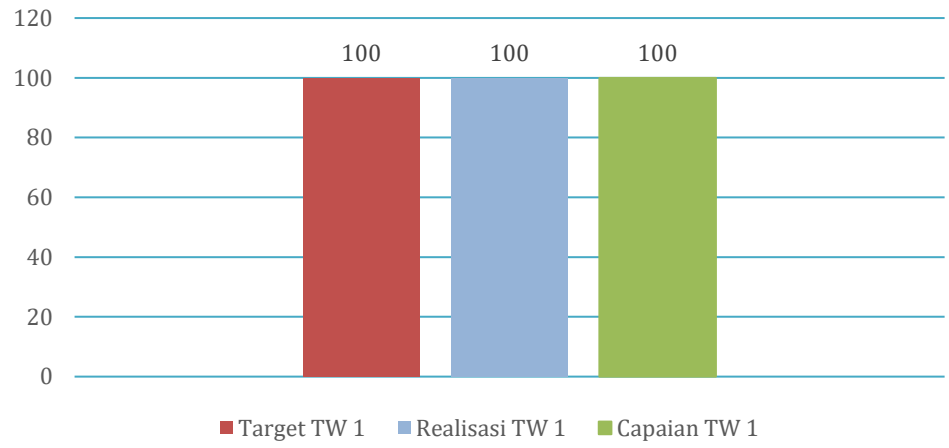
www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Pada Triwulan I 2025, sampel KLB adalah sebanyak 0 sampel. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

Grafik 3.1.3
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.11
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI

www.bandung.pom.go.id

STANDAR"

TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100,00%	100%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain:

1. Dampak positif dari Program Nasional BPOM sehingga meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hal-hal yang menyebabkan KLB terjadi.
2. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap Masyarakat melalui medsos BBPOM (Instagram,Twitter) memudahkan dalam penyebaran informasi mengenai KLB.
3. Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan tidak adanya sampel KLB yang di uji oleh Balai Besar POM di Bandung

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
2. Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
3. Program Pasar Aman

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

www.bandung.pom.go.id

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.12
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan	100,00%	7,75%	12,90%	11,90%	Tidak Efisien

www.bandung.pom.go.id

pangan yang diuji sesuai standar					

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : (A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%.

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

www.bandung.pom.go.id

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%.

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%.

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%.

TABEL 3.1.13
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	

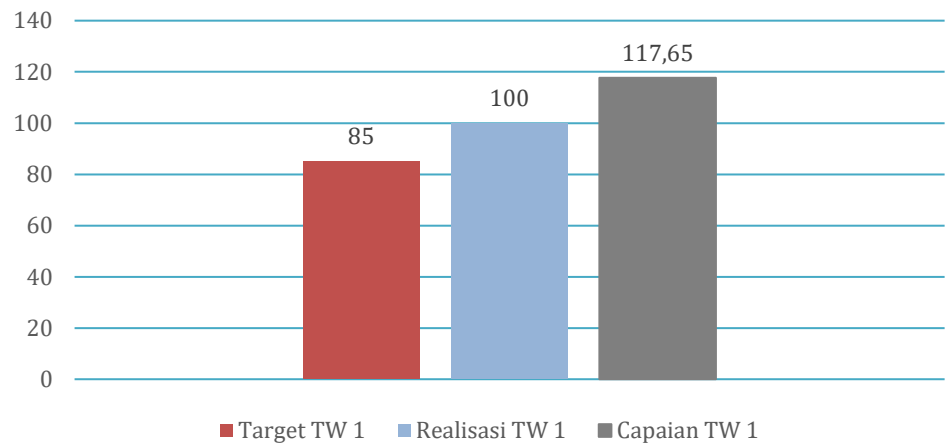
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Seluruh sampel PIRT yang telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 30 sampel PIRT telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 25 sampel memenuhi syarat, 5 sampel tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 1 ampel TMS Kimia (Kadar tartrazin) dan 4 sampel TMS Mikro (ALT, AKK). Terdapat penundaan pengujian (clock off) terhadap sampel yang disampling di bulan Januari dan Februari karena adanya

www.bandung.pom.go.id

kerusakan pada alat ICPMS. Mekanisme clock off mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 100 Tahun 2025 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tindak lanjut berupa perbaikan alat telah dilakukan sehingga alat berfungsi kembali dan pengujian sampel dapat dilanjutkan (clock on). Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi timeline yang ditetapkan. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100,00%. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar 117,65% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Grafik 3.1.4
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 117,65% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.14
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN "
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada jumlah sampel yang disampling dan diuji berkurang dari target yang telah ditetapkan.
2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2025.
3. Renlak disusun dengan tepat disesuaikan dengan kondisi dan waktu pelaksanaan sampling dilakukan sesuai jadwal.
4. Penyusunan anggaran yang tepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
5. Adanya aplikasi internal (Appsheet) yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut .
6. Pelatihan personel sampling yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS.
7. Pengambilan contoh sampel PIRT yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan.
8. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel PIRT.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

www.bandung.pom.go.id

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel PIRT untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
5. Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR

www.bandung.pom.go.id

Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.15
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	117,65%	7,75%	15,18%	14,18%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang

www.bandung.pom.go.id

dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diukur dengan rumus : (A+B) /2 dengan rincian sebagai berikut :

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha X 100%.
B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor X 100%.

TABEL 3.1.16
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA

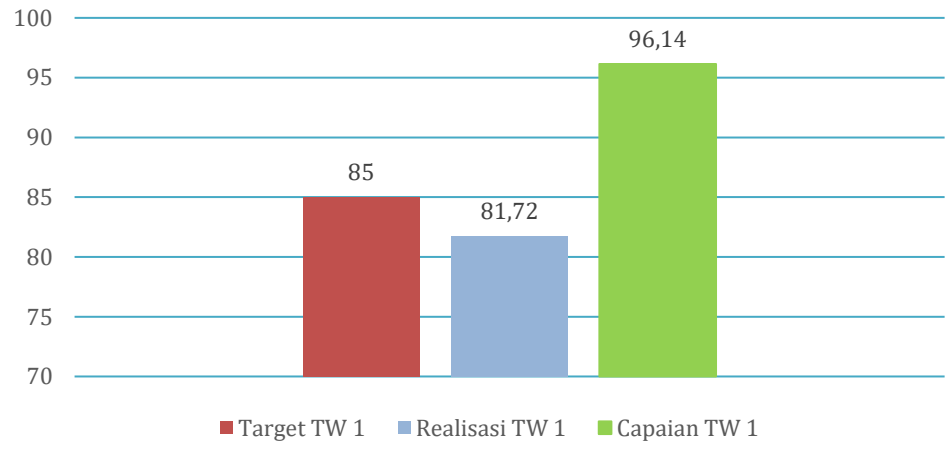
www.bandung.pom.go.id

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	81,72%	96,14%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Sebanyak 76 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari 93 rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 81,72%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **96,14%** dengan kriteria **Baik.**

Grafik 3.1.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 96,14% dengan kategori Akan Tercapai.

www.bandung.pom.go.id

TABEL 3.1.17
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00%	81,72%	96,14%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan karena Terdapat 14 sarana distribusi pangan yang belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikirimkan. Sarana berupa supermarket, ritel modern dan toko tradisional

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Dilakukan komunikasi kepada PIC sarana untuk dilakukan desk CAPA melalui telepon atau WA.

www.bandung.pom.go.id





Gambar 3.1.1 Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa desk CAPA secara mandiri yang bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

2. Diberikan surat resmi penagihan CAPA sebagai pengingat

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kegiatan desk CAPA adalah proses evaluasi, verifikasi, dan monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action) yang dilakukan melalui penilaian dokumen yang disampaikan

www.bandung.pom.go.id

oleh pihak sarana baik secara offline maupun online. Dengan melakukan desk CAPA maka sekaligus memberikan bimbingan bagaimana membuat CAPA yang jelas dan benar.

2. Diberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha misalnya dengan memberikan bimbingan teknis bagaimana menyusun CAPA yang efektif, focus pada akar masalah dan pencegahan berulang.
3. Penggunaan platform digital dalam monitoring CAPA yaitu aplikasi Satu POM Jabar dan Galura Inspeksi. Monitong progress CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha dan evaluasi oleh petugas

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

1. Berdasarkan informasi yang didapat maka untuk menunjang keberhasilan capaian kinerjanya, sarana yang penyampaian respon CAPA nya kurang memadai dilakukan pendampingan diantaranya dengan kegiatan desk CAPA. Kegiatan inovasi ini dinamai SANGKURIANG.
2. Untuk memudahkan dalam monitoring capaian kinerja maka dibuat kertas kerja yang memuat data sarana, tanggal pemeriksaan, tanggal surat rekomendasi/ tindak lanjut dan tanggal respon atas rekomendasi yang disampaikan. Rekapitulasi capaian kinerjanya dimonitor dan dievaluasi dalam rapat kinerja bulanan bersama pimpinan.
3. Untuk mengingatkan secara otomatis kepada pelaku usaha melalui WA jika timeline untuk penyampaian CAPA telah sampai batasnya maka telah dan sedang dikembangkan aplikasi pengembangan dari Satu POM Jabar yaitu Galura Inspeksi (Gerbang Audit dan Laporan untuk Usaha Regulasi Akurat). Selain itu Galura Inspeksi juga digunakan untuk memantau progress CAPA yang diterima dan dievaluasi oleh petugas

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.18

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

www.bandung.pom.go.id

"PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,14%	21,32%	4,51%	3,51%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

a. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
b. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
c. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana,

www.bandung.pom.go.id

pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%.
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%.
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6 :
    1. Ketepatan penetapan tindak lanjut
    2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
    3. Kesesuaian format laporan inspeksi
    4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
    5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
    6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai

www.bandung.pom.go.id

diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

TABEL 3.1.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,00%	93,75%	106,53%	Sangat Baik	

Pada Triwulan I, seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang ditargetkan dapat terlaksana, namun terdapat ketidaksesuai pemenuhan timeline untuk

www.bandung.pom.go.id

sarana produksi Obat bahan Alam. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.1.20
RINCIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TA 2025

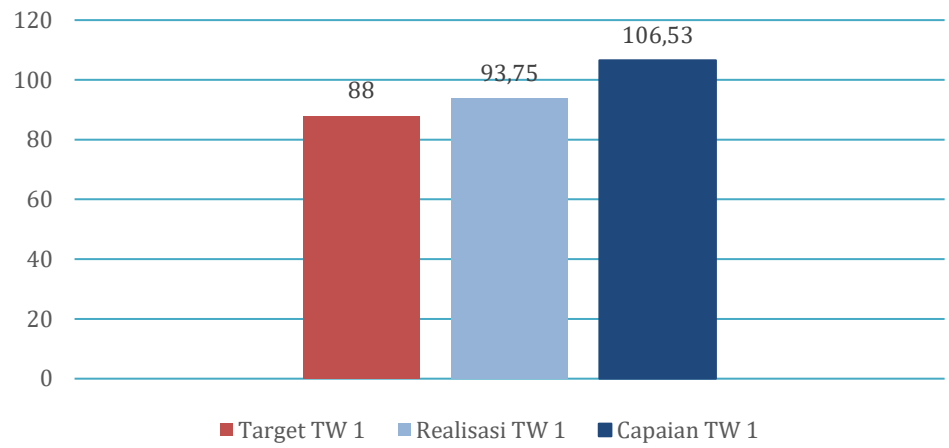
SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI OBAT	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	100%
	CAPAIAN INDUSTRI OBAT	100%
IOT/IEBA	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	0%
	CAPAIAN INDUSTRI IOT/IEBA	75%
UKOT	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI UKOT	100%
UMOT	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	-
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	-
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	-
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	-
	CAPAIAN INDUSTRI UMOT	
INDUSTRI SK	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	-
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	-
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	-
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	-
	CAPAIAN INDUSTRI SK	
INDUSTRI KOSMETIK	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	100%
	CAPAIAN INDUSTRI KOSMETIK	100%
CAPAIAN SARPROD SEDIAAN FARMASI		**93.75%**

www.bandung.pom.go.id

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,00%. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 93,75%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **106,53%** dengan kriteria **Sangat Baik.**

Grafik 3.1.6
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 88,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar **106,53%** dengan kategori **Tercapai**.

TABEL 3.1.21
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	88,00%	93,75%	106,53%	Tercapai	

www.bandung.pom.go.id

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunaan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penetapan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPOB 24 orang, CPOTB 45 orang dan CPKB 29 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Kepala, Senior ataupun Junior.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel

www.bandung.pom.go.id

- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Peningkatan kompetensi inspektur CPOB melalui Bimbingan Teknis CPOB dengan Topik "Penulisan temuan, laporan inspeksi dan penetapan tindak lanjut hasil inspeksi" yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Surabaya secara daring pada tanggal 17 – 18 Februari 2025.



Gambar 3.1.2 Bimbingan Teknis CPOB dengan Topik "Penulisan temuan, laporan inspeksi dan penetapan tindak lanjut hasil inspeksi"

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.22
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

www.bandung.pom.go.id

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106,53%	28,31%	3,76%	2,76%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang

www.bandung.pom.go.id

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa x 100%.

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
   a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
   b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
   c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
      - pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK).
      - pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK).
      - pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).
   d. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

TABEL 3.1.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA

www.bandung.pom.go.id

Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	98,15%	122,69%	Tidak dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan I, seluruh sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang ditargetkan dapat terlaksana dan ditindaklanjuti sesuai pedoman, namun terdapat ketidaksesuaian pemenuhan timeline pada pelaporan SIPT sarana produksi IRTP. Secara terperinci capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

TABEL 3.1.24
"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

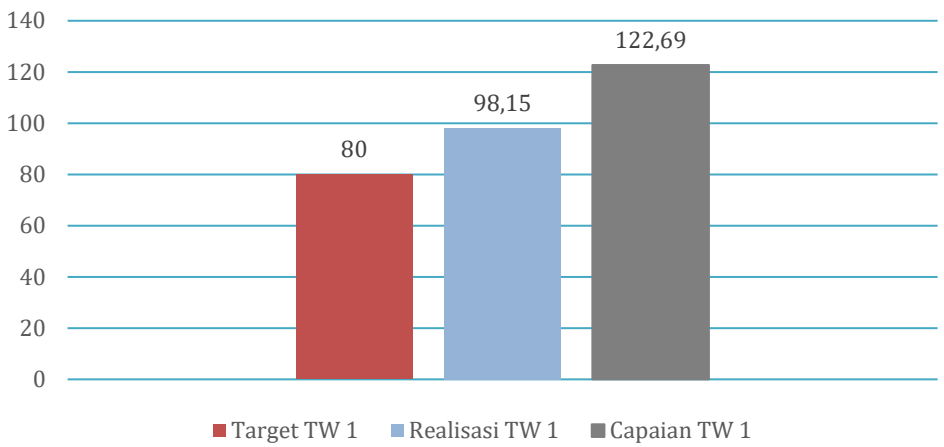
SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI PANGAN	A. pemenuhan target sarana produksi yang diperiksa	100.00%
	B. Ketepatan tindak lanjut	100.00%
	C. Kesesuaian waktu pelaporan	94.44%
	CAPAIAN INDUSTRI PANGAN	98.15%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,00%. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,15%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **122,69%** dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan.**

www.bandung.pom.go.id

Grafik 3.1.7
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 80,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 122,69% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.25
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN "PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN" TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00%	98,15%	122,69%	Tercapai	▲

www.bandung.pom.go.id

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Penyusunaan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Pangan Olahan termasuk IRTP. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur Pangan sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda ataupun Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal ataupun informal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisis adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

www.bandung.pom.go.id





Gambar 3.1.3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Pelatihan Food Inspektur Dasar yang diselengarakan oleh PPSDM bekerjasama dengan Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan di tindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.26
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

www.bandung.pom.go.id

"PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN (TERMASUK IRTP) YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122,69%	28,31%	4,33%	3,33%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas

www.bandung.pom.go.id

yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
    1. Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
    2. Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
    a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%.
    b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan

www.bandung.pom.go.id

inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

TABEL 3.1.27
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang	91,75%	90,79%	98,95%	Baik	

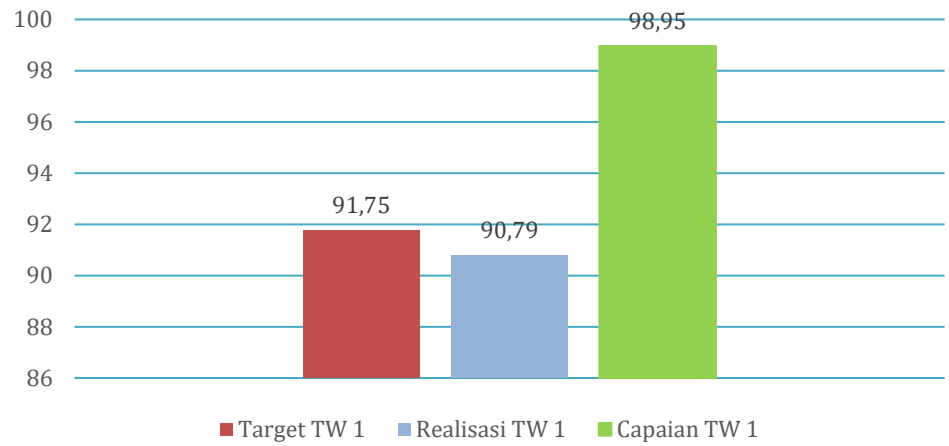
www.bandung.pom.go.id

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,75%. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90,79%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **98,95%** dengan kriteria **Baik**.

Grafik 3.1.8
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91,75%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 98,95% dengan kategori Akan Tercapai..

TABEL 3.1.28
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,75%	90,79%	98,95%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

Pada triwulan I, realisasi kinerja distribusi Obat 100%, distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan 75% dan distribusi Kosmetik 97,37%. Terdapat pelaporan melalui SIPT sebanyak 24 sarana distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan pada serta 2 sarana distribusi Kosmetik yang timelinenya terlewati

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Pembinaan teknis kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

www.bandung.pom.go.id

4. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu Mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa.
5. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
6. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
7. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
8. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin antar tim pemeriksa untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi.
9. Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
10. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.
2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya
3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA

www.bandung.pom.go.id

nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan,

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.29
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.95 %	27,69%	3,57%	2,57%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuandisimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pengawasan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan

www.bandung.pom.go.id

3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C) dengan rincian sebagai berikut :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

TABEL 3.1.30
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

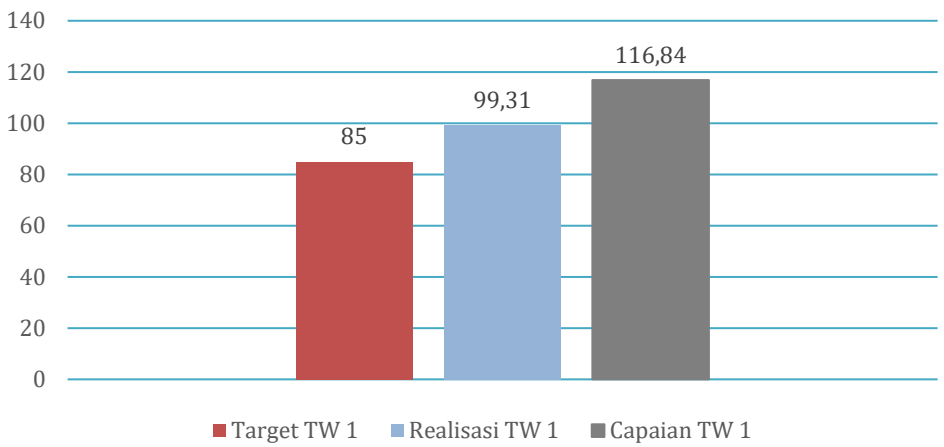
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	99,31%	116,84%	Tidak dapat Disimpulkan	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85,00%. Pada Triwulan I 2025, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 99,31%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **116,84%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

www.bandung.pom.go.id

Grafik 3.1.9
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 116,84% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.31
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	99,31%	116,84%	Tercapai	▲

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

www.bandung.pom.go.id

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain :

Pada triwulan I dari 29 sarana yang dilaporkan melalui SIPT sebanyak 27 sarana distribusi Pangan sesuai timeline sedangkan sebanyak 2 saranamelewati timeline pelaporan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Pembinaan teknis kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa
2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi. Mengadakan pertemuan rutin antar tim pemeriksa untuk membahas progres dan kendala yang dihadapi

www.bandung.pom.go.id

6. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.
7. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan tanggal 14 Maret dan 18 Maret 2025





Gambar 3.1.4 Koordinasi Lintas Sektor

8. Pengawasan Takjil dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Ramadhan tanggal 17 Maret 2025



www.bandung.pom.go.id



Gambar 3.1.5 Pengawasa Takjil dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Ramadhan

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.
2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya
3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.32
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116,84%	35,33%	3,31%	2,31%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen kesehatan, dan Obat Kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada

www.bandung.pom.go.id

surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b/2
   a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = Jumlah iklan yang selesai diawasi/Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan = Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%
B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
   b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%
D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2
   a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4). Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

www.bandung.pom.go.id

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
   a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
   b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
   c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

TABEL 3.1.33
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	100,00%	119,79%	Tidak Dapat Disimpulkan	

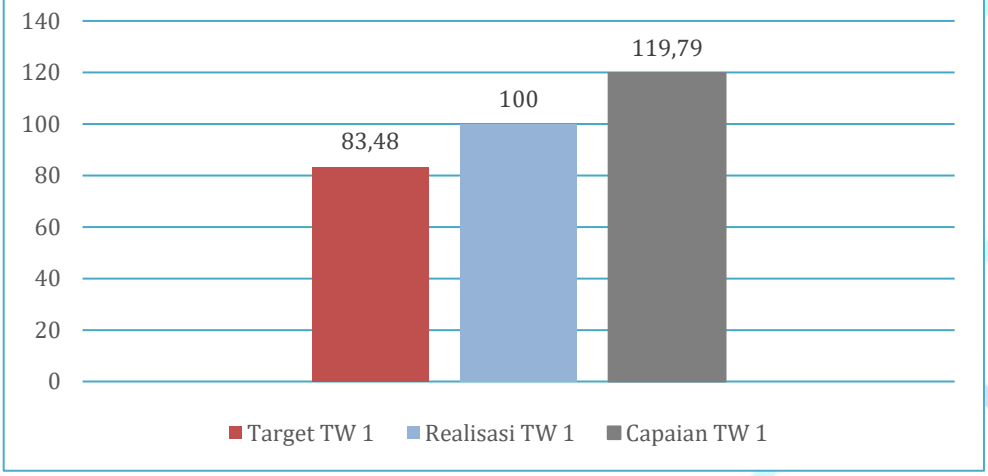
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,48%. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan

www.bandung.pom.go.id

Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **119,79%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.**

Grafik 3.1.10
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 83,48%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 119,79% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.34
PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,48%	100,00%	119,79%	Tercapai	▲

www.bandung.pom.go.id

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan iklan dengan melakukan kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan iklan.
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan iklan tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

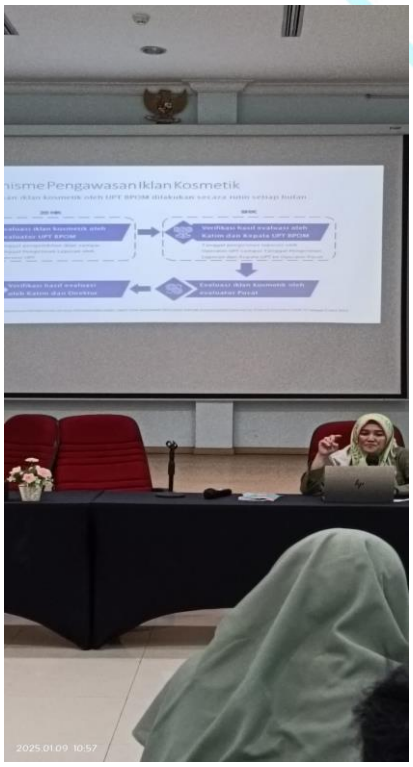
- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan iklan.
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT Iklan .

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar personil pengawasan iklan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel.
- Peningkatan kompetensi personil pengawasan iklan dengan mengadakan sharing knowlage tentang pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara internal yang diselenggarakan secara luring pada bulan 9 Januari 2025.

www.bandung.pom.go.id



Gambar 3.1.6 Kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan untuk personil pengawasan Iklan di Sub Kelompok Inspeksi BBPOM Di Bandung

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, dengan memanfaatkan aplikasi SIPT dan Aplikasi pengawasan iklan di Pusat antarlain SiAPIK untuk pengawasan iklan obat, SiREKA untuk pengawasan iklan Obat Bahan Alam,Kuasi dan Suplemen Kesehatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.35
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	119,79%	27,28%	4,39%	3,39%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-2 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **110,00%** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.36.

TABEL 3.1.36
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11,00%	14,29%	129,91%	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			110,00%	Tidak dapat Disimpulkan	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman

www.bandung.pom.go.id

tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

TABEL 3.1.37
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11,00%	14,29%	129,91%	Tidak Dapat Disimpulkan	

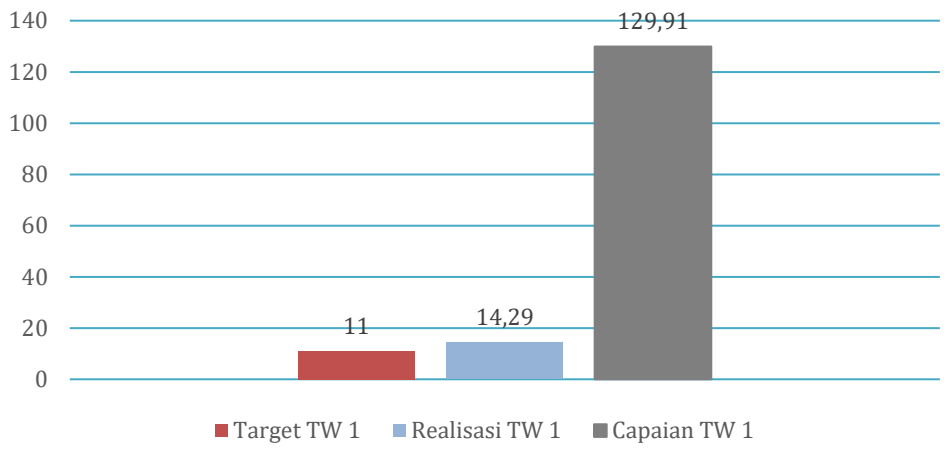
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 11,00%. Jumlah sarana pangan fortifikasi yang berada di cakupan pengawasan Balai Besar POM di Bandung adalah sebanyak 63

www.bandung.pom.go.id

sarana. Pada triwulan I, sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 9 (sembilan) sarana, sehingga persentase cakupan sebesar 14,29%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **129,91%** dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan.**

Grafik 3.1.11
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 57,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 25,07% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.38
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang	57,00%	14,29%	25,07%	Perlu Upaya Keras	

www.bandung.pom.go.id

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain :

- Pada Triwulan I, terjadi perubahan target pemeriksaan sarana pangan fortifikasi, dari semula sebanyak 7 sarana (11%) menjadi sebanyak 9 sarana (14,3%). Hal tersebut disebabkan karena adanya perintah pemeriksaan sarana fortifikasi minyak goreng sawit (produsen Minyak Kita). Dengan kenaikan tersebut persentase capaian meningkat menjadi 129,91% terhadap target triwulan I.
- Penyusunaan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPPOB sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda dan Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corective Action dan Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisis adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

www.bandung.pom.go.id

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

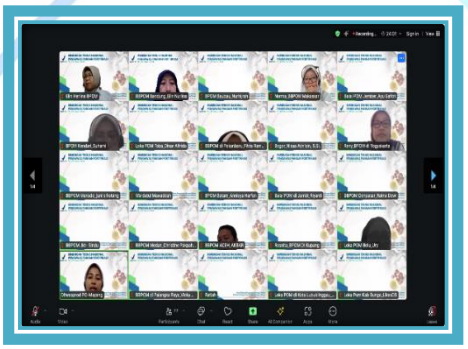




Gambar 3.1.7 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM POM Bersama Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.





Gambar 3.1.8 Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan pangan fortifikasi

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

www.bandung.pom.go.id

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.39
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	129,91%	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-3 MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **103,80%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.40.

TABEL 3.1.40
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,00%	82,00%	103,80%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			103,80%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

   Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir

www.bandung.pom.go.id

Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
   - Standar Ruang Lingkup;
   - Standar Peralatan;
   - Standar Kompetensi Laboratorium;
   - Standar Metode yang terverifikasi.

b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
   - Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
   - Standar Peralatan;
   - Standar Kompetensi Laboratorium.

TABEL 3.1.41
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"
TRIWULAN I TAHUN 2025

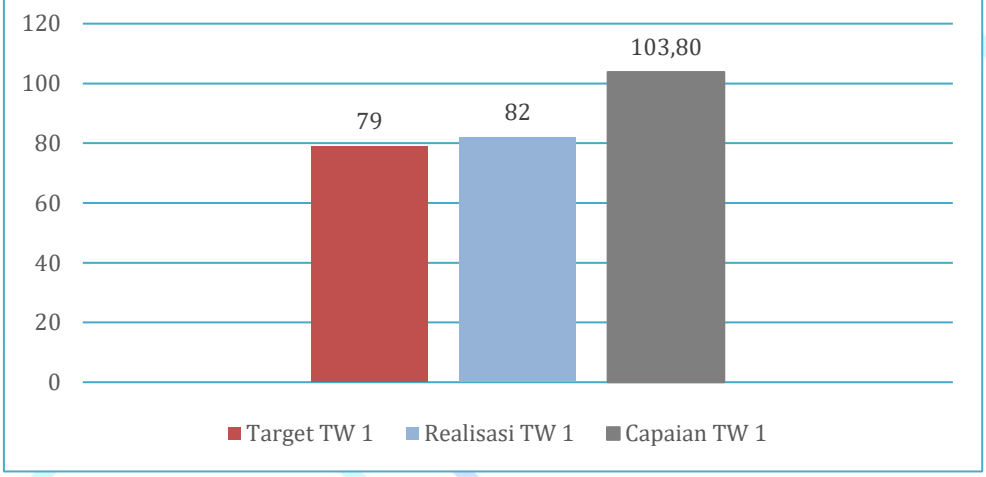
www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,00%	82,00%	103,80%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 79,00%. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 82,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **103.80%** dengan kriteria **Sangat Baik.**

Grafik 3.1.12
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81,70%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,37% dengan kategori Tercapai.

www.bandung.pom.go.id

TABEL 3.1.42
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,70%	82,00%	100,37%	Tercapai	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain :

1. Pemenuhan SRL pada triwulan I sebesar 84,50%, SRL laboratorium kimia 81,90% dengan rincian laboratorium obat sebesar 75,20%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 85,30%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 94,20%, SRL laboratorium pangan sebesar 73,00%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 87,00%.
2. Pemenuhan peralatan sebesar 86,80%, dengan rincian nilai pemenuhan peralatan kimia sebesar 90,20% dan pemenuhan peralatan mikrobiologi sebesar 83,40%.
3. Pemenuhan kompetensi laboratorium pengujian dan mikrobiologi sebesar 80%.
4. Pemenuhan metode terverifikasi sebesar 64,00%, dengan rincian pemenuhan metode terverifikasi laboratorium obat sebesar 38,10%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 48,30%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 72,00%, SRL laboratorium pangan sebesar 68,30%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 93,20%.

www.bandung.pom.go.id

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup : Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada.
2. Pemenuhan Kompetensi : Membuat roadmap peningkatan kompetensi penguji sesuai kemampuan melakukan pengujian pada masing-masing laboratorium.
3. Pemenuhan Peralatan : Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di tahun anggaran 2025.
4. Pemenuhan metode terverifikasi : Membuat roadmap penambahan metode terverifikasi pada masing-masing laboratorium.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Untuk pemenuhan standar ruang lingkup pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 5 metode analisa.
- Untuk pemenuhan kompetensi SDM pada triwulan I tahun 2025, laboratorium obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan obat kuasi serta laboratorium pangan dan mikrobiologi sudah memenuhi kedua aspek penilaian kompetensi. Sedangkan laboratorium obat dan laboratorium kosmetik belum memenuhi aspek 2 penilaian kompetensi.
- Untuk pemenuhan metode analisa terverifikasi pada triwulan I tahun 2025 Laboratorium Obat sebanyak 8 Metode Analisa, laboratorium Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi sebanyak 2 Metode Analisa, laboratorium kosmetik 2 Metode Analisa.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

www.bandung.pom.go.id

Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.

Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.43
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103,80%	0,07%	1406,53 %	1405,53 %	Tidak Efisien

www.bandung.pom.go.id

Berdasarkan tabel diatas, indicator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-4 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **102,57%** dengan kriteria **SANGAT BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.44.

TABEL 3.1.44
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,18%	100,28%	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20,00%	20,00%	100,00%	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	15,00%	20,00%	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00%	20,00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			102,57%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. **TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

   Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan

www.bandung.pom.go.id

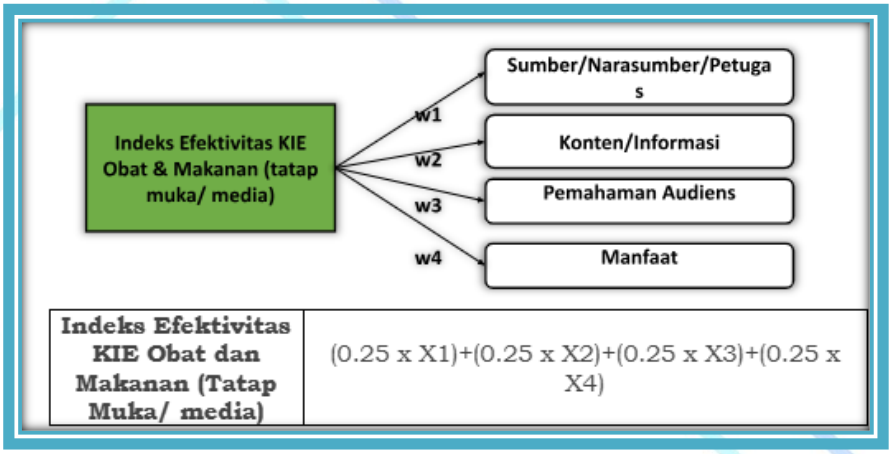
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 3.1.9 Rumus Indeks Efektifitas KIE

www.bandung.pom.go.id

TABEL 3.1.45

KATEGORI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE

SKOR INDEKS 100	INTERPRETASI EFEKTIVITAS
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

TABEL 3.1.46

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"

TRIWULAN I TAHUN 2025

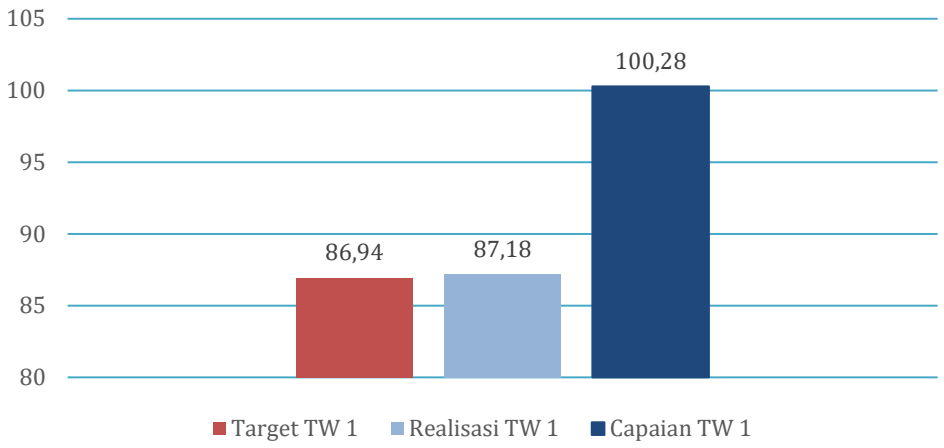
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,18%	100,28%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,94%. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 87,18%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,28%** dengan kriteria **Sangat Baik.**

www.bandung.pom.go.id

Grafik 3.1.13
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 86,94%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,28% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.47
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86,94%	87,18%	100,28%	Tercapai	▲

www.bandung.pom.go.id

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat
2. Melakukan KIE melalui sosial media melalui infografis dan videografis yang menarik di Instagram secara masif dengan topik yang terjadwal
3. Melakukan KIE melalui videotron bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Kota Bandung
4. Melakukan KIE bekerjasama dengan Pramuka
5. Melaksanakan KIE melalui kegiatan pameran bekerjasama dengan Kemendagri
6. Membuat link survey yang mudah diakses oleh responden.



Gambar 3.1.10 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 22 Maret 2025



Gambar 3.1.11 Karya Bakti Lebaran SAKA POM 26 Maret 2025

www.bandung.pom.go.id



Gambar 3.1.12 KIE melalui Sosial Media bulan Januari 2025



Gambar 3.1.13 KIE melalui Sosial Media bulan Februari 2025



www.bandung.pom.go.id

Gambar 3.1.14 KIE melalui Sosial Media bulan Maret 2025



Gambar 3.1.15 KIE melalui videotron bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Kota Bandung



Gambar 3.1.16 Kegiatan Pameran Hari Desa di Kabupaten Sumedang, 16 Januari 2025

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain
2. Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
3. Melaksanakan KIE secara merata di seluruh wilayah BBPOM di Bandung secara komprehensif
4. Menjaga konsistensi kegiatan melalui media social

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

www.bandung.pom.go.id

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE
2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
3. Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden
4. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
5. Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algoritma dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.48
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100,28%	0,12%	811,94 %	810,94 %	Tidak Efisien

www.bandung.pom.go.id

Berdasarkan tabel diatas, indicator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

a. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
b. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
c. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
    1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
    2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
    3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. BBPOM di Bandung melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Apabila Kabupaten/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

www.bandung.pom.go.id

a. Sekolah Full Intervensi yang berjumlah 17 sekolah dengan tahapan :
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

   Jumlah sekolah yang akan akan dikawal pada tahun 2025 adalah 26 sekolah dari 3 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kota Bekasi.

b. Sekolah Perluasan merupakan sekolah yang mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan di luar dari sekolah yang mendapatkan full intervensi. Jumlah sekolah perluasan yang akan mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan yaitu 60 sekolah.

TABEL 3.1.49

TAHAPAN PJAS

Tahapan	UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov – Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2-4)
	100%	

TABEL 3.1.50

www.bandung.pom.go.id

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

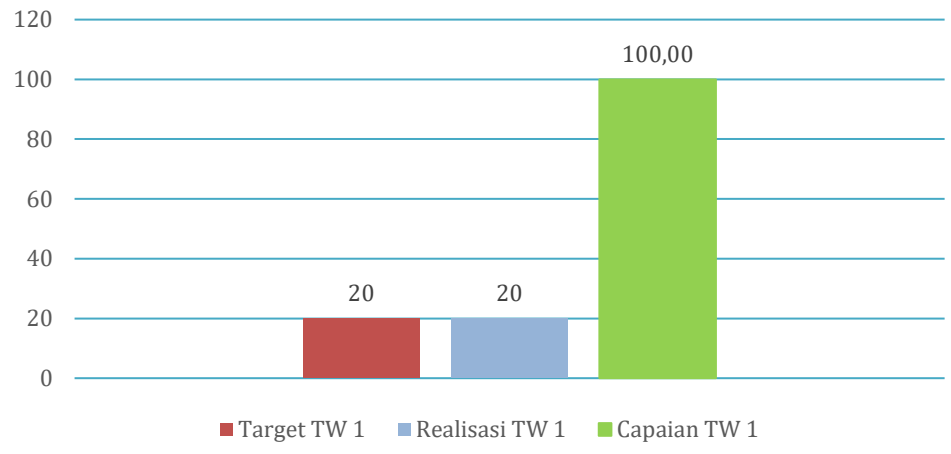
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20,00%	20,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20,00%. Progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 20,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

Grafik 3.1.14
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung

www.bandung.pom.go.id

terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 20,00% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.51
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100,00%	20,00%	20,00%	Perlu Upaya keras	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja untuk Indikator Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilakukan karena koordinasi dan kerja sama yang baik antara BBPOM di Bandung dengan Pemerintah Daerah setempat untuk bersinergi mewujudkan program keamanan pangan. Kolaborasi antara BBPOM di Bandung dengan pemerintah daerah yang terus terjalin dapat membuat indikator ini dapat terlaksana dengan baik dan terus berkesinambungan.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kolaborasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas Kesehatan, kabupaten kota setempat terkait pengawasan obat dan makanan
2. Koordinasi antara BBPOM di Bandung dengan Dinas pendidikan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

www.bandung.pom.go.id

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pangan olahan di komunitas sekolah secara berkala dengan berkoordinasi dengan puskesmas setempat.
2. Melakukan Penyebaran Informasi terkait Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah secara luring/daring.



Gambar 3.1.17 Audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.52
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN" TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20,00%	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

a. kader keamanan pangan desa yang aktif
b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

TABEL 3.1.53

TAHAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli **atau** November

www.bandung.pom.go.id

6.	Pengawalan	10%	Februari - November
	Total Skor	**100%**	

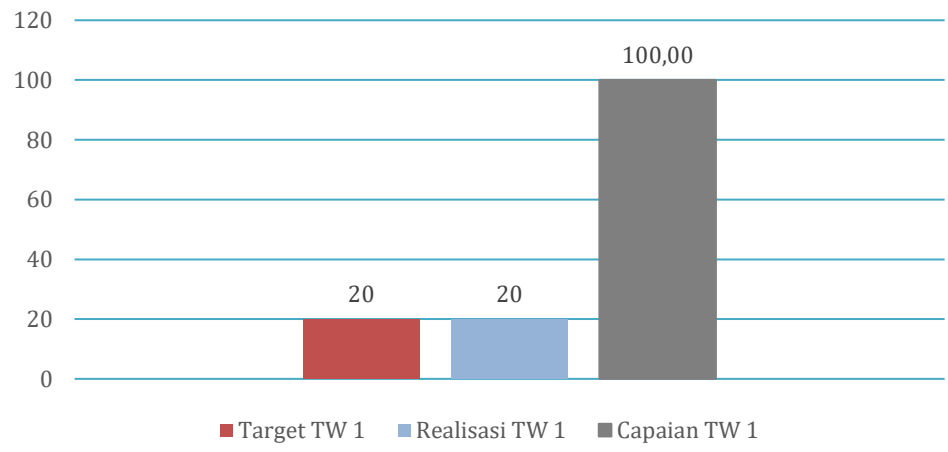
TABEL 3.1.54
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah Desa Pangan Aman	20,00%	20,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20,00%. Progres Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 20,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

Grafik 3.1.15
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung

www.bandung.pom.go.id

terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 20,00% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.55
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN "
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah Desa Pangan Aman	100,00%	20,00%	20,00%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilam capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

a. Pelaksanaan Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan juknis dan timeline yang telah ditetapkan.
b. Koordinasi dengan Pemda setempat dan OPD terkait di kabupaten/ kota berjalan baik menyebabkan semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut pada periode berikutnya antara lain:

a. Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan dan keberlanjutan program agar tetap bisa berjalan secara mandiri

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja dengan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan audiensi pada tanggal 25 Maret 2025

www.bandung.pom.go.id







Gambar 3.1.18 Audiensi Program Prioritas Keamanan Pangan dengan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 25 Maret 2025

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.56
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"JUMLAH DESA PANGAN AMAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	20,00 %	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

www.bandung.pom.go.id

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah Desa Pangan Aman disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas,

www.bandung.pom.go.id

termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

TABEL 3.1.57

TAHAPAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

TABEL 3.1.58

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"

TRIWULAN I TAHUN 2025

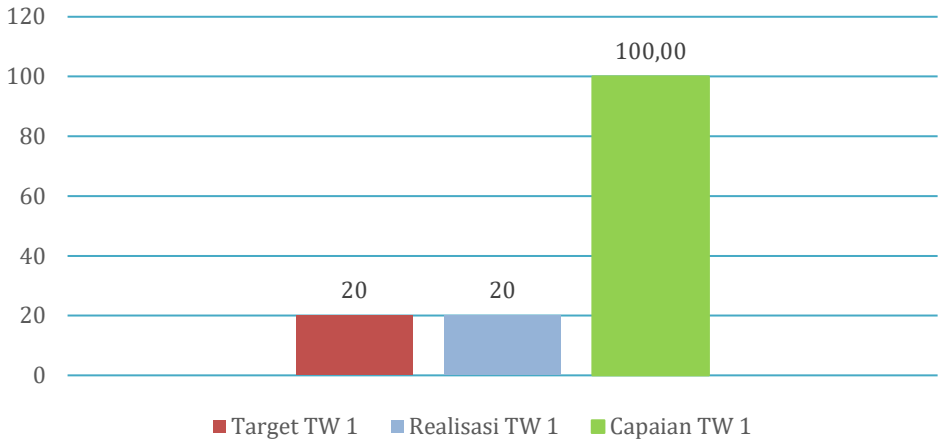
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00%	20,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Pada Triwulan I 2025, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

www.bandung.pom.go.id

Grafik 3.1.16
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 20,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 20% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**

TABEL 3.1.59
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"
TRIWULAN I TAHUN 2024

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00%	20,00%	20,00%	Perlu Upaya Keras	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berubah-rubah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

www.bandung.pom.go.id

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

a. Pembuatan perencanaan sesuai dengan pedoman terbaru.
b. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaikan dengan Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunintas.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

Audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada 25 Maret 2025. Audiensi diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr. R. Vini Adiani Dewi beserta jajarannya. Pada kegiatan audiensi Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi BBPOM di Bandung menyampaikan rencana audiensi dengan Gubernur Jawa Barat dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025.



Gambar 3.1.19 Audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

www.bandung.pom.go.id

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

a. Berdasarkan informasi kinerja yang didapatkan digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pada TW II
b. Pedoman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang baru dapat menumbuhkan inovasi sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk video "Kabayan Ngelmu" yang dapat diakses secara *online* di 1POMJabar.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.60
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00%	-%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-5 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **111,13%** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.61.

TABEL 3.1.61
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,00%	16,67%	111,13%	Tidak dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			111,13%	Tidak dapat Disimpulkan	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut :

www.bandung.pom.go.id

a) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD;
b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
   - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
   - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
   - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
   - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
   - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor;

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

A. Ruang Lingkup UMKM:
1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:
1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah

www.bandung.pom.go.id

UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan :
   a) Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB
   b) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMK Pangan Olahan :
   a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
   b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

   Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:
   a. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
   b. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
   c. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
   d. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
   e. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/

www.bandung.pom.go.id

atau Tahap 3); dan

f. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

a. UMKM yang memproduksi kosmetik;

b. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);

c. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

d. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

TABEL 3.1.62

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau

www.bandung.pom.go.id

				daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

TABEL 3.1.63

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT BAHAN ALAM

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan

www.bandung.pom.go.id

	UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator			disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

TABEL 3.1.64

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

www.bandung.pom.go.id

Perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

A. Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB / Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%
B. jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap / Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan x 100%
C. Jumlah rekomendasi SPA CPKB / Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

TABEL 3.1.65
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,00%	16,67%	111,13%	Tidak dapat Disimpulkan	

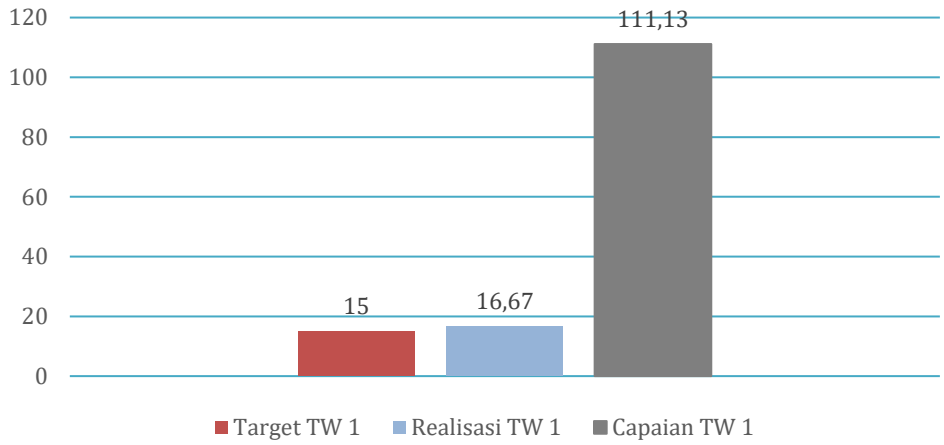
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 15,00%. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 16,67%. Dengan demikian, nilai

www.bandung.pom.go.id

pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **111,13%** dengan kriteria **Sangat Baik.**

Grafik 3.1.17
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025**

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 81,70%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,37% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.66
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	100,00%	16,67%	16,67%	Perlu Upaya Keras	▲

www.bandung.pom.go.id

Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2024 disebabkan antara lain :

- Kegiatan Bimtek UMKM Pangan Olahan dilaksanakan lebih cepat dari target waktu yang telah dijadwalkan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tahapan Seleksi Target Pendampingan UMKM

   Untuk menetapkan UMKM yang akan dijadikan target dalam program pendampingan UMKM Tahun 2025 dilakukan tahapan seleksi UMKM. Pada tahapan ini BBPOM Di Bandung membuka pendaftaran yang disosialisasikan secara terbuka melalui medsos BBPOM Di Bandung,

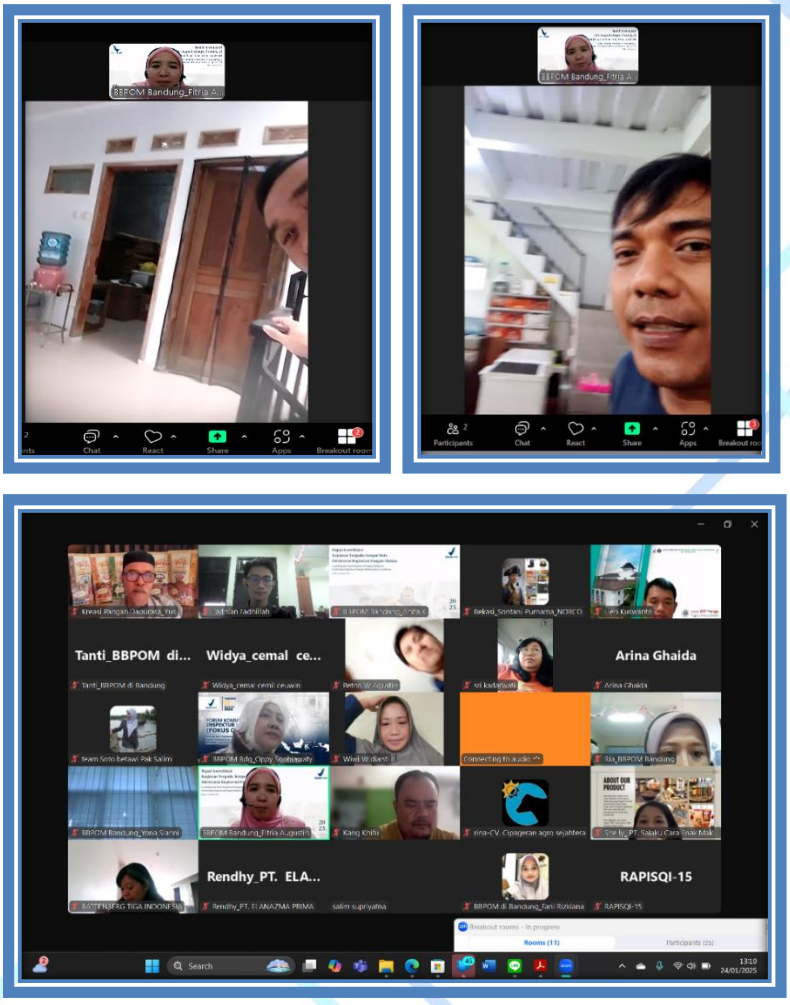


Gambar 3.1.20 Informasi pendaftaran pendampingan UMKM

www.bandung.pom.go.id

Selain itu BBPOM Di Bandung juga berkolaborasi dengan instansi atau stake holder terkait dimana pada tahapan ini memberikan usulan UMKM yang dapat dicalonkan menjadi target pendampingan.

Dari UMKM yang mendaftar secara langsung dan UMKM yang diusulkan oleh stake holder tersebut, dilakukan pemilihan target berdasarkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing UMKM. Untuk UMKM yang lolos tahapan evaluasi dokumen selanjutnya dilaksanakan tahapan seleksi yang dilakukan melalui wawancara terhadap UMK secara daring (aplikasi zoom).



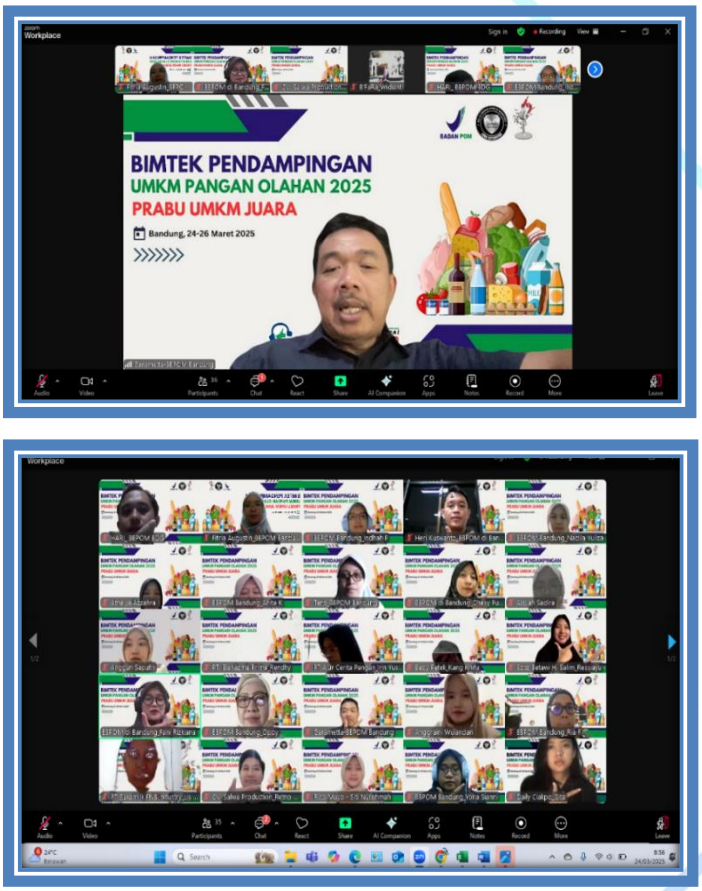
Gambar 3.1.21 Wawancara terhadap UMKM yang lolos seleksi

2. Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

   Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM pangan Olahan yang diselenggarakan secara daring untuk 18 UMKM pangan olahan pada tanggal 24-26 Maret 2025 yang merupakan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan olahan. Pada kegiatan ini para pelaku usaha diberikan pemaparan materi terkait seluruh aspek Cara Produksi Pangan

www.bandung.pom.go.id

Olahan Yang Baik (CPPOB), E-Sertifikasi dalam Rangka Izin Penerapan CPPOB dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melali E-Reg RBA.



Gambar 3.1.22 Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, BBPOM Di Bandung memiliki inovasi PRABU UMKM JUARA (Pendampingan Pelaku Usaha agar Berdaya Unggul untuk UMKM Juara yang merupakan inovasi dalam rangka pelaksanan program pendampingan UMKM. Dalam pelaksanaannya Prabu UMKM Juara berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat diantaranya adalah dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

www.bandung.pom.go.id

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.67
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	111,13%	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-6 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **110,00%** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.68.

TABEL 3.1.68
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	17,00%	50,88%	299,29%	Tidak Dapat Disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			110,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;

www.bandung.pom.go.id

3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy.

TABEL 3.1.69
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

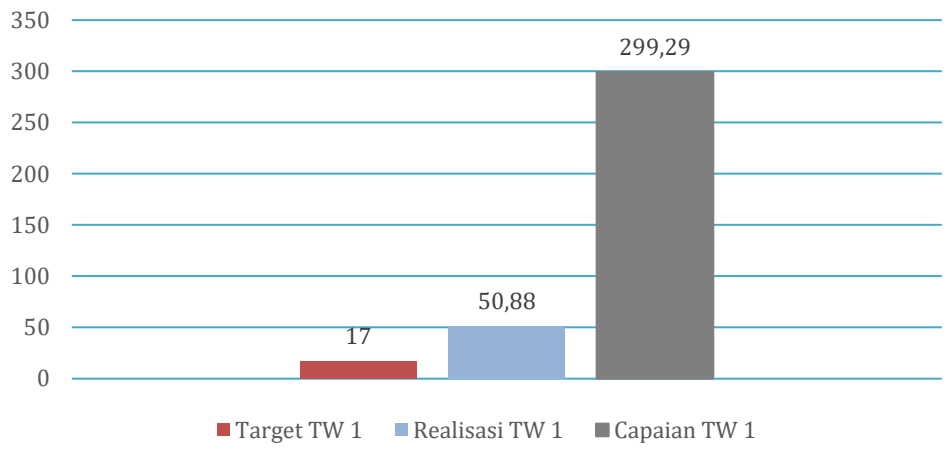
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	17,00%	50,88%	299,29%	Tidak Dapat Disimpulkan	

www.bandung.pom.go.id

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 17,00%. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung sebesar 45,50%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **267,65%** dengan kriteria **Tidak dapat Disimpulkan.**

Grafik 3.1.18
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 72.00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 100,37% dengan kategori Tercapai.

TABEL 3.1.70
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Keberhasilan Penyidikan	72,00%	50,88%	70,67%	Akan Tercapai	

www.bandung.pom.go.id

Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung					

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Adanya jejaring informasi dalam pengumpulan bahan keterangan yang baik, sehingga diapatkan informasi awal yang akurat terkait terjadinya tindak pidana Obat dan Makanan. Pada bulan Maret 2025 dilakukan operasi penindakan terhadap 1 (satu) sarana yang diduga melakukan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dimana informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana tersebut berasal dari jejaring informasi yang dimiliki.
- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan lintas sektor, yaitu Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Polda Metro Jaya, sehingga tahap pelaksanaan operasi penindakan dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Pada bulan Februari 2025, atas bantuan Seksi Korwas PPNS Direktorat Kriminal Khusus Metro Jaya, dilakukan penjemputan tersangka yang telah 2 (dua) kali mangkir dari pemanggilan sehingga Tahap 2 perkara atas tersangka tersebut dapat dilaksanakan.
- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan ICJS yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu se-optimal mungkin. Pada Triwulan I Tahun 2025, koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menghasilkan terlaksananya Tahap 2 untuk 2 (dua) orang tersangka yang perkaranya sudah P-21 pada tahun 2024. Selain itu, terdapat juga perkara tahun 2024 yang diterbitkan P-21 setelah sebelumnya mengalami kendala terkait saksi berkewarganegaraan asing.

www.bandung.pom.go.id

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke Poksi Penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah catchment area BBPOM di Bandung.
- Memelihara koordinasi berkelanjutan dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya khususnya dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan sepanjang proses penyidikan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk setiap berkas perkara yang sedang ditangani agar penyelesaian berkas dapat dilakukan secara efektif dan efisien

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Penyidikan Obat dan Makanan

  Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada Triwulan I tahun 2025, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 9 perkara dengan rincian 1 (satu) perkara tahun 2025 dan 8 (delapan) perkara carry over.

  Perkara tahun 2025 yang sedang ditangani merupakan tindak lanjut dari operasi penindakan pada awal Maret 2025 yaitu perkara terkait Obat Bahan Alam illegal/ mengandung BKO. Terhadap perkara ini sudah ditetapkan tersangka dan direncanakan akan dilakukan Tahap I pada Triwulan II tahun 2025.

  Perkara carry over sebanyak 8 (delapan) perkara merupakan perkara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Jumlah perkara carry over semula berjumlah 10 (sepuluh) perkara di awal tahun 2025. Atas intensifikasi yang dilakukan PPNS, maka 2 (dua) perkara dapat

www.bandung.pom.go.id

diselesaikan hingga tahap 2. Adapun 8 (delapan) perkara tersisa terdiri dari 1 (satu) perkara Tahap 1 dan 7 (tujuh) perkara P-21. Intensifikasi dalam penyelesaian perkara akan tetap dilaksanakan demikian juga koordinasi terhadap lintas sektor terkait.

- Investigasi Awal

  Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patroli siber). Selama Triwulan I tahun 2025, dilakukan kegiatan investigasi awal sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap 9 (sembilan) sarana dengan hasil sejumlah 1 (satu) sarana dinyatakan berpotensi untuk dapat dilakukan penindakan.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun ekternal, sebagai berikut :

- Mengingat bahwa capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 sebesar **299,29%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, maka perlu dilakukan penyesuaian target Triwulan II tahun 2025 berdasarkan laporan kemajuan perkara yang sedang ditangani. Adapun target Triwulan II tahun 2025 diusulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 53,0 % dari semula 26,0 %.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.71
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	299,29%	23,33%	13,40%	12,40%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-7 TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **100,00%** dengan kriteria **BAIK**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.72.

TABEL 3.1.72
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,00%	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan

www.bandung.pom.go.id

Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

www.bandung.pom.go.id

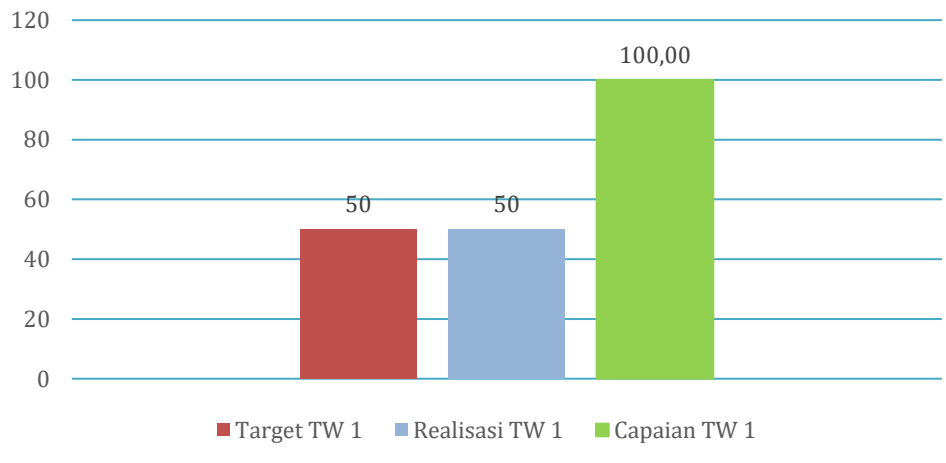
TABEL 3.1.73
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 50,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **100,00%** dengan kriteria **Baik.**

Grafik 3.1.19
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Triwulan I Tahun 2025



www.bandung.pom.go.id

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50,00%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada triwulan I sebesar 55,56% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.74
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90,00%	50,00%	55,56%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada triwulan I tahun 2025 disebabkan antara lain :

- Pelaksanaan patrol siber menggunakan aplikasi *inawebcrawler* yang memudahkan petugas dalam input dan olah data. Dalam aplikasi tersebut tersedia menu pengaturan yang memungkinkan *cut-off* data dilakukan secara otomatis pada waktu yang telah diaturkan. Hal ini menyebabkan pelaporan patrol siber dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Manajemen personil juga memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan capaian kinerja ini. Kepatuhan seluruh personil untuk input data sebelum masa cut-off sehingga ketika cut-off dilakukan, jumlah data yang ter-input sudah mencukupi. Penanggung jawab kegiatan

www.bandung.pom.go.id

selalu memberikan peringatan kepada personil untuk melakukan entry data dan memastikan sudah cukup data yang ter-input ketika melakukan cut-off.

- Kegiatan penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan telah direncanakan akan diselesaikan pada TW IV tahun 2025. Telah ditetapkan target tahun 2025 UPT sebanyak 1 analisis yang kemudian akan diberikan penilaian oleh Kepala UPT.
- Kegiatan pelaporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal juga telah ditetapkan sebanyak 1 laporan tiap tahun. Direncanakan pelaporan akan dilaksanakan di TW IV tahun 2025. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi dan pengumpulan terhadap analisis/ policy brief yang diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk kemudian dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Pada Triwulan II Tahun 2025, Penanggung Jawab kegiatan akan menjalani cuti besar dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Telah ditunjuk personil yang akan menggantikan sementara dalam pengawasan pelaksanaan patroli siber. Dipastikan bahwa personil pengganti telah memahami tugas yang akan dilaksanakan agar tidak menemukan kendala.
- Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan.
- Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/policy brief DIt. Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT.
- Melakukan koordinasi dengan poksi-poksi UPT dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

Penelusuran Siber

www.bandung.pom.go.id

Penelusuran siber dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber). Patroli siber dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan secara daring terutama terhadap komoditi yang diduga illegal, seperti : TIE, BKO, Iklan TMS, dll. Perkembangan pemasaran produk melalui media daring seperti media social, platform e-commerce, dan website yang semakin meningkat merupakan potensi besar terjadinya pelanggaran. Patroli siber dilakukan dengan mengumpulkan data terkait peredaran produk meliputi data produk (identitas, dugaan pelanggaran, jumlah terjual, jumlah stok, dan harga jual), data penjual (nama penjual, platform yang digunakan, lokasi penjual) dan alamat atau link penjualan beserta *capture* laman penjualan. Seluruh data tersebut umumnya tersedia di platform yang digunakan dan tidak membutuhkan keahlian atau peralatan khusus dalam pengumpulannya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Pada pelaksanaannya, secara internal Poks i Penindakan menetapkan target minimal 50 (limapuluh) link penjualan untuk dilaporkan tiap bulan. Terhadap link tersebut direkomendasikan untuk dilakukan takedown.

Berikut rekapitulasi hasil patroli siber yang dilakukan selama TW I tahun 2025 :

TABEL 3.1.75

REKAPITULASI HASIL PATROLI SIBER

Berdasarkan Komoditi	
Komoditi	Jumlah
Obat	22
Obat Bahan Alam	66
Kosmetik	46
Suplemen Kesehatan	25
Jumlah	159

Berdasarkan Wilayah	
Kota/Kab	Jumlah
Kota Bandung	75
Kab. Bandung	30
Kab. Bandung Barat	3
Kota Cimahi	17
Kota Bekasi	11
Kab. Bekasi	11
Kab. Cianjur	1
Kota Cirebon	1

www.bandung.pom.go.id

Kab. Cirebon	2
Kab. Garut	2
Kab. Indramayu	1
Kab. Majalengka	1
Kab. Subang	1
Kab. Sumedang	3
Jumlah	**159**

Kemudian terhadap 1 (satu) link dengan penjualan terbesar dilakukan profiling menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporan patrol siber. Hasil patrol siber dan profiling sepenuhnya dikelola dan diolah oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

1. Pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan

   Fungsi cegah tangkal di UPT dilaksanakan melalui penyusunan analisis kerawanan kejahatan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Penyusunan analisis dilakukan dengan membuat kajian/ analisis terhadap isu-isu kejahatan sesuai dengan wilayah UPT. Termasuk dalam kegiatan ini adalah Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Data yang di-input ke dalam aplikasi bersumber dari hasil kegiatan intelijen, hasil kegiatan penindakan/ penyidikan, hasil pengujian pihak ketiga di UPT, data permohonan bantuan ahli yang ditujukan kepada UPT dari pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil monev dari Dit Cegah Tangkal Badan POM RI, pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan UPT pada TW I tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh data yang di-input 100,0 % disetujui (tidak ada data ditolak/ di-hold/perlu perbaikan). Pada bulan Maret 2025 terjadi kendala teknis di ADP yang menyebabkan 6 (enam) data di-hold namun tidak mempengaruhi persentase data yang disetujui.

   Terkait penyusunan analisis kerawanan kejahatan yang akan dilaksanakan UPT, saat ini Poksi Penindakan sedang menilai isu yang berpotensi diangkat ke dalam analisis.

www.bandung.pom.go.id

Terhadap rekomendasi tindak lanjut kerawanan kejahatan, baik yang bersumber dari analisis Dit Cegah Tangkal maupun yang bersumber dari analisis yang disusun oleh UPT, dilakukan hal-hal berikut:

- Penyebaran informasi rekomendasi kepada poksi-poksi lain yang terkait melalui Ketua Tim kerja.
- Komunikasi intensif dengan para ketua tim kerja terkait mengenai rekomendasi yang diberikan dengan harapan agar ketua tim dapat melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan rekomendasi dengan pelaksanaan tugas rutin.
- Secara rutin memantau tindak lanjut/ feedback dari poksi-poksi terkait.
- Penyusunan laporan feedback untuk disampaikan pada TW IV tahun 2025.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mencapai target kinerja dan mengukur performa poksi di UPT
2. Analisa kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja. Pada kondisi actual tidak ada anggaran khusus yang ditujukan untuk pelaksanaan sasaran kegiatan tersebut.
3. Penggunaan data silang yang mendukung tercapainya kinerja fungsi lain, misalnya : data penelusuran siber dapat digunakan sebagai *raw data* dalam penyusunan analisis kerawanan kejahatan UPT.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.76
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
"PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG"
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	100,00%	0,00%	-%	-%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indicator Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-8 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.77.

TABEL 3.1.77
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	0,00%	-	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro

www.bandung.pom.go.id

Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

TABEL 3.1.78

KATEGORI NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

www.bandung.pom.go.id

SASARAN KEGIATAN KE-9 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.79.

TABEL 3.1.79
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-9
TRIWULAN I TAHUN 2025

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
2. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	-

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah

www.bandung.pom.go.id

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

a. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
b. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

TABEL 3.1.80

KRITERIA PENILAIAN PMPZI

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

www.bandung.pom.go.id

2. NILAI AKIP BALAI BESAR DI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

TABEL 3.1.81

BOBOT KOMPONEN PENILAIAN AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12

www.bandung.pom.go.id

4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

TABEL 3.1.82

PREDIKAT NILAI AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat

www.bandung.pom.go.id

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran :

TABEL 3.1.83

KATEGORI KONVERSI NILAI KINERJA ANGGARAN

www.bandung.pom.go.id

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

TABEL 3.1.84

KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

www.bandung.pom.go.id

a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
c. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

TABEL 3.1.85

NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas :

Skor Maturitas = Skor Total / 16

Keterangan:

a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

www.bandung.pom.go.id

3.2. RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Berdasarkan data kinerja pada periode sebelumnya, Tindak Lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada setiap indicator adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2.1

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

TAHUN 2025

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Aplikasi SIPT belum menampilkan data timeline pengujian (SLA) untuk sampel rutin Sediaan Farmasi, baru diterapkan pada pengujian sampel pihak ketiga, sehingga pemantauan masih dilakukan secara manual	Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi dilakukan secara manual yang dibuat internal			Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi secara manual yang dibuat internal	Desember 2025	
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sarana pelayanan yang ada di wilayah Balai Besar POM Bandung belum secara rutin melakukan pelaporan efek samping obat yang terjadi di sarana		Maret 2025	KIE pelaporan KTD dan ESO kepada tenaga kesehatan. Sampai dengan 30 Maret 2025 terdapat 3 sarana yang sudah secara aktif melakukan pelaporan ESO	Monitoring evaluasi hasil KIE yang telah diberikan	Desember 2025	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel Pangan Olahan belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaikan alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki	-	-	Sampel Pangan Olahan dapat diuji menggunakan alat ICPMS
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Pengujian sampel dilakukan saat sampel KLB masuk ke Laboratorium Pengujian	Pembentukan tim pengujian sampel KLB	April 2025	Tim Pengujian sampel KLB telah dibentuk	-	-	Tim Pengujian telah siap untuk melakukan pengujian sampel KLB
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaikan alat ICPMS	Maret 2025	Alat ICPMS telah diperbaiki	-	-	Sampel PIRT dapat diuji menggunakan alat ICPMS
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	CAPA yang diterima jumlahnya belum memadai	● Pembuatan surat penagihan CAPA kepada pelaku usaha ● Dilaksanakan Desk CAPA ● Fitur permohonan desk CAPA pada aplikasi 1POMJabar	Desember 2025	1) Membuat surat penagihan CAPA kepada pelaku usaha ; 2) menghubungi sarana untuk	Fitur permohonan desk CAPA pada aplikasi	Desember 2025	Sarana distribusi obat sebagian besar memberikan respon CAPA namun sarana

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	ditindaklanjuti oleh stakeholder				dilakukan desk CAPA	Satu POM Jabar		distribusi pangan masih banyak yang belum memberikan respon meskipun sudah dihubungi melalui telepon dan WA
		Pemantauan CAPA masih dilakukan secara manual yang diambil dari email corporate	Sistem pemantauan CAPA yang dibuat internal	Desember 2025	Pemantauan CAPA sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyempurnaan pemantauan CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Desember 2025	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	Penggunaan aplikasi SATUPOM Jabar belum diimplementasikan, masih proses perbaikan, untuk pengolahan perhitungan timleine menggunakan excel	Bulan Juli 2025	
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	Penggunaan aplikasi SATUPOM Jabar belum diimplementasikan, masih proses perbaikan, untuk pengolahan perhitungan timleine	Bulan Juli 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
						menggunakan excel		
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan data hasil pemeriksaan sarana dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL secara manual 3) Pengiriman CAPA melalui email corporate 4) Pemantauan CAPA secara manual	1) Pengumpulan data base hasil pemeriksaan sarana dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL melalui aplikasi Satu POM Jabar 3) Pengiriman CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyempurnaan aplikasi Satu POM Jabar terkait input data, pengelompokkan data dan bentuk laporannya	Desember 2025	Tarikan data dapat dianalisa dan digunakan sebagai data dukung pelaporan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan data hasil pemeriksaan sarana dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL secara manual 3) Pengiriman CAPA melalui email corporate 4) Pemantauan CAPA secara manual	1) Pengumpulan data base hasil pemeriksaan sarana dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar; 2) Pengiriman dan pemantauan surat TL melalui aplikasi Satu POM Jabar 3) Pengiriman CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Satu POM Jabar	Desember 2025	Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pengiriman surat TL, pemantauan CAPA sudah dilakukan melalui aplikasi Satu POM Jabar	Penyempurnaan aplikasi Satu POM Jabar terkait input data, pengelompokkan data dan bentuk laporannya	Desember 2025	Tarikan data dapat dianalisa dan digunakan sebagai data dukung pelaporan
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan							
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari SIPT, masih menggunakan data monev manual	Penarikan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan (tanggal 5 bulan berikutnya) dari akun admin UPT dan diolah menggunakan aplikasi satuPOM JABAR	Bulan April 2025	Penggunaan data dari SIPT untuk monev capaian produksi telah dilaksanakan untuk Monev TW 1 TAHUN 2025	Penggunaan aplikasi SATUPOM Jabar belum diimplementasikan, masih proses perbaikan, untuk pengolahan perhitungan timleine menggu	Bulan Juli 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
						nakan excel		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium masih belum optimal	Pembuatan roadmap peningkatan nilai pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium	Juni 2025	Rencana kegiatan verifiasi metode analisa, kalibrasi alat lab, dan peningkatan kompetensi laboratorium	Peningkatan nilai ruang lingkup dengan mengadakan sampel yang tidak tersedia, pelaksanaan peningkatan kompetensi penguji dan pengadaan alat laboratorium baru	Desember 2025	
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1) indeks fektifitas KIE pada TW 1 memenuhi target sebesar 87,18%, namun jumlah target responden tatap muka belum memenuhi target hal ini dikarenakan Rencana Pelaksanaan KIE dengan tomas belum ada penjadwalan. Target responden untuk KIE Media juga belum memenuhi target dikarenakan jumlah responden yang mengisi tidak dapat secara tepat diperkirakan.	Melakukan koordinasi dengan tenaga Ahli untuk membuat penjadwalan untuk meningkatkan responden tatap muka. Untuk responden media diupayakan dengan membuat link dan survey lebih mudah serta ajakan kepada rsponden untuk mengisi survey efektifitas	Desember 2025	Pelaksanaan KIE di minggu Ke- 3 hanya dilakukan di 2 titik dengan jumlah peserta 400 orang. Untuk responden media sudah dilakukan publikasi ajakan pengisian survey.	Penjadwalan untuk penyelenggaraan KIE bersama 8 tomas yang lain belum dapat disusun. Untuk KIE media dilakukan pembuatan infografis yang lebih menarik	Desember 2025	sudah dilaksanakan kegiatan KIE untuk 2 tomas sejumlah 4 titik dengan jumlah responden sebaran bulan 25 April 2025 untuk media 20 responden dan untuk tatap muka sejumlah 30 responden
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Memastikan tahapan advokasi dengan lintas sektor berjalan dengan baik sehingga pemerintah daerah setempat dapat berkomitmen untuk mereplikasi program sekolah dengan PJAS aman secara menyeluruh	April 2025	-	Rencana pelaksanaan Advokasi minggu ke IV April 2025	April 2025	\
		Pemberdayaan SAKA POM belum optimal	Memberdayakan organisasi seperti Pramuka (SAKA POM) untuk mensosialisasikan	Desember 2025	-	Melakukan sosialisasi	Desember 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			keamanan pangan pada komunitas sekolah			keamanan pangan kepada komunitas sekolah dengan memberdayakan SAKA POM		
		Masih kurangnya kesadaran sekolah tentang keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran sekolah akan pentingnya keamanan pangan sehingga sekolah dapat memprioritaskan untuk melakukan program keamanan pangan.	Desember 2025	-	Melakukan pengawalan dan monitoring kepada tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan sekolah	Desember 2025	
		Kader Keamanan Pangan Sekolah belum maksimal dalam mensosialisasikan Keamanan pangan	Mendorong keaktifan kader keamanan pangan sekolah untuk mensosialisasikan keamanan pangan secara masive baik secara langsung atau melalui media sosial supaya informasi terbaru terkait keamanan pangan dapat diketahui secara luas	Desember 2025	-	Melakukan pengawalan dan berkomunikasi secara aktif dengan kader keamanan pangan sekolah untuk selalu mensosialisasikan KP secara massive	Desember 2025	
16	Jumlah desa pangan aman	Advokasi dengan lintas sektor belum dilaksanakan	Peningkatan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan dan keberlanjutan program agar tetap bisa berjalan secara mandiri	April 2025	-	Rencana pelaksanaan Advokasi minggu ke IV April 2025	April 2025	sudah dilakukan koordinasi dengan pemeritah daerah Kabupaten Bandung Barat terkait target yang akan mejadi

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
								lokus desa yang akan mendapatkan intervensi Program Desa Pangan Aman
		Masih kurangnya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk tentap konsisten melaksanakan Program Desa Pangan Aman	Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan	Desember 2025		Melakukan pengawalan dan monitoring, evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan	Desember 2025	
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Program PPABK	Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPABK	April 2025		Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah	April 2025	
		Masih kurangnya komitmen pimpinan/kader keamanan pangan di pasar tentang keamanan pangan	Peningkatan tindaklanjut hasil sampling dan pengujian	Desember 2025		Melakukan KIE kepada pedagang dan melakukan advokasi kepada kepala pasar dan pemda setempat	Desember 2025	
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang tentang keamanan pangan	Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pedagang	Desember 2025		Melakukan KIE kepada pedagang	Desember 2025	
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan	Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan umk	Desember 2025		Melaksanakan tahapan fasilitasi kepada UMK Pangan Olahan,	Desember 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	CPPOB Pangan Olahan					Obat Bahan Alam dan Kosmetik		
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang persyaratan dan regulasi yang berlaku	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMK	April 2025	Melaksanakan Bimbingan Teknis UMKM	Sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis UMKM untuk Pelaku usaha UMK Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik	April 2025	
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	Terdapat 10 perkara carry over di bulan Januari tahun 2025 dengan rincian : • 4 perkara Tahap 1 • 6 perkara P21	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperatif 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara		1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperatif 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara	1. Intensifikasi penyelesaian berkas perkara 2. Upaya paksa bagi tersangka yang sudah P21 namun tidak kooperatif 3. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelesaian perkara	Desember 2025	2 perkara carry over telah diselesaikan, terisa 8 perkara carry over di bulan Maret tahun 2025 dengan rincian : • 1 perkara Tahap 1 • 7 perkara P21
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	Belum dilakukan penilaian oleh Kepala UPT terhadap analisis kejahatan yang disusun pada tahun 2024	Akan dilakukan penilaian analisis kejahatan yang telah disusun pada tahun 2024	Maret 2025	Sudah dilakukan penilaian terhadap analisis kejahatan yang disusun pada tahun 2024			Analisis kejahatan tahun 2024 sudah dinilai oleh Kepala UPT

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat perubahan/pembaruan regulasi tentang perizinan, sehingga standar pelayanan perlu dilakukan reviu, serta ada penambahan jenis pelayanan sehubungan dengan pelimpahan kewenangan untuk layanan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, obat Kuasi	Melakukan reviu standar pelayanan publik untuk 9 jenis layanan yang ada, dan menyusun draft standar pelayanan untuk layanan Rekomendasi Importir OBA, SK, obat Kuasi. Serta melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan Standar Pelayanan	Mei 2025	Terdapat 2 jenis layanan yang sudah direviu	7 jenis layanan dalam proses reviu, 1 jenis layanan dalam proses penyusunan	Mei 2025	- Terdapat 2 dokumen draft jenis layanan - sudah dilakukan pembahasan rencana pelaksanaan FKP
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	Belum terdapat penetapan pengelola Inovasi kegiatan Internalisasi WBS	Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas			Menetapkan pengelola inovasi kegiatan internalisasi WBS dan menindaklanjuti pengaduan sampai dengan tuntas	Desember 2025	
		Belum terdapat pengembangan invovasi layanan public	Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja			Menyusun dan menetapkan latar belakang pengembangan inovasi pelayanan publik berdasarkan risiko yang ada atau kebutuhan Unit Kerja	Desember 2025	
		Belum terlaksana Continuous improvement	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang			Melaksanakan continuous improvement dan meningk	Desember 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			atkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima		
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	Belum memiliki Rencana Strategis Tahun 2025-2029	Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM	Juli 2025		Menyusun Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029	Juli 2025	
		Tidak ada penetapan Indikaor Kinerja Utama	Menyusun SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja (PK)	Maret 2025	Menyusun SK penetapan IKU			
		Belum ada reviu dalam penetapan target IKU	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja dilengkapi dengan justifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya serta kertas kerja reviu menyajikan seluruh indikator dan dilengkapi dengan informasi target usulan dari Balai, hasil reviu unit pengampu/Biro Perencanaan dan Keuangan	Maret 2025	Menyusun matriks reviu target indikator kinerja (Matriks A2 melalui aplikasi simetris)			
		Terdapat perbedaan target pada dokumen perencanaan kinerja	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	Maret 2025	Menyusun kertas kerja keselarasan target indikator kinerja PK, RAPK,			
		Dokumen perencanaan kinerja belum	Mempublikasikan dokumen perencanaan SAKIP pada e-	Mei 2025		Mempublikasikan	Mei 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		dipublikasikan secara lengkap	SAKIP REVIU dan subsite Satuan Kerja			dokumen perencanaan SAKIP ; Renstra, PK, dan RAPK pada e-SAKIP Reviu dan subsite informasi kinerja bbpom bandung		
		Belum ada manual IKU yang merupakan dasar pengukuran kinerja	Menyusun dan mengesahkan manual IKU sebagai acuan dalam pengukuran kinerja seluruh indikator	Mei 2025		Menyusun manual IKU Tahun 2025-2029	Mei 2025	
		SOP mikro tentang Manajemen Kinerja Organisasi belum mengatur secara lengkap dan rinci	Menyempurnakan SOP Mikro Manajemen Kinerja Organisasi pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan: • Media/sarana pengumpulan data; Timeline penyampaian laporan kinerja bulanan dan triwulanan; Mekanisme usulan perubahan/perbaikan data kinerja	Juli 2025		Melakukan reviu dan revisi SOP Mikro manajemen kinerja, pada mekanisme Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan menambahkan:	Juli 2025	
		Notulen rapat beum menggambarkan arahan pimpinan yang spesifik	Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik	Desember 2025		Menyusun notulen rapat monev dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pencapaian kinerja	Desember 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
						secara spesifik		
		Realisasi kinerja pada pelaporan di SIMETRIS, SKP Pimpina, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim berbeda	Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Desember 2025		Sumber data pelaporan menggunakan sumber data valid di aplikasi SIMETRIS.. dan Membuat kertas kerja realisasi kinerja 2025, sbb: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-HFxbIIkbumjXhnilelZiAIDrdTbnHYX/edit?usp=sharing&ouid=112059272181934449045&rtpof=true&sd=true	Desember 2025	
		Pengisian Kendala dan RTL pada aplikasi SIMETRIS tidak tertib	Melakukan pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai	Desember 2025		Pengisian kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Desember 2025	
		Laporan kinerja interim belum menyajikan terkait peruabhan ndikator dan upaya perbaikan kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan atau rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja, analisis	Desember 2025		Menyusun laporan kinerja interim, dengan menyajikan penjelas	Desember 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			program/kegiatan yang menunjang keberhasilan seluruh indikator			an terkait penambahan indikator kinerja dan upaya perbaikan penyempurnaan kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan seluruh indikator		
		Laporan kinerja tahunan belumsesuai dengan Pedoman SAKIP	Menyusun laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan penggunaan target akhir periode renstra yang mutakhir	Februari 2025	Menyusun laporan kinerja tahun 2024 sesuai pedoman penyelenggaraan SAKIP			
		Penyajian realisasi kinerja pada berbagai laporan, masih terdapat perbedaan	Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja	Desember 2025		Menyusun kertas kerja keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja, melalui link sbb :	Desember 2025	
		belum ada rencana pengembangan kompetensi tim kerja	Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Manajemen Kinerja terkait implementasi SAKIP	Maret 2025	Menyusun pengembangan kompetensi tim manajemen kinerja terkait implementasi SAKIP			

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		Laporan evaluasi internal belum sesuai pedoman SAKIP	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan: Analisis capaian target output berupa identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya; Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan; Timeline pelaksanaan rekomendasi/rencana aksi dan penentuan timeline yang memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal; Menyusun identifikasi kendala dan rencana aksi secara memadai	Desember 2025		Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai Pedoman penyelenggaraan SAKIP BPOM	Desember 2025	
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	Nilai komponen deviasi Hal III masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi RPD secara berkala	Desember 2025		Melakukan monev dan penyesuaian RPD setiap Triwulan	Desember 2025	
		Nilai komponen pengelolaan UP dan TUP masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi UP / TUP secara berkala	Desember 2025		Monitoring pelaksanaan UP /TUP	Desember 2025	
		Penetapan target belum menyesuiakan dengan kondisi efisiensi dan relaksasi	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian target RO	Desember 2025		Melakukan monev dan penyesuaian target caput setiap TW	Desember 2025	
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	Keterlibatan semua pegawai dalam pengelolaan risiko belum maksimal	Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam pengelolaan risiko, terutama dalam melakukan identifikasi risiko	September 2025		Menyusun kuisioner Identifikasi Risiko untuk seluruh pegawai	September 2025	
		Data dukung pelaksanaan kegiatan pengendalian	Menyusun mekanisme pengendalian aktifitas yang memuat data dukung atribut pengendalian	September 2025		Membuat Kertas Kerja aktifitas pengen	September 2025	

www.bandung.pom.go.id

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum*		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		aktifitas belum optimal				dalian per poksi		
		Belum ada tinjauan implementasi manajemen risiko	Melaksanakan tinjauan manajemen risiko	September 2025		Melaksanakan tinjauan implementasi manajemen risiko	September 2025	

www.bandung.pom.go.id

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp66.390.943.000,-, Pagu Non Blokir sebesar Rp31.230.862.000,- dengan rincian: (1) Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp46.635.378.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp13.690.035.000,-; dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp19.755.565.000,-, pagu non Blokir sebesar Rp17.540.827.000,-. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi anggaran sebesar Rp. 4.690.579.300,- (15.02%).

TABEL 3.3.1
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

PROGRAM	PAGU (Rp)	PAGU DIKURANGI BLOKIR	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	46.635.378.000	13.690.035.000	302.792.922	1.57%
Program Dukungan Manajemen	19.755.565.000	17.540.827.000	4.378.786.378	25.01%
TOTAL	66.390.943.000	31.230.862.000	4.690.579.300	15.02%

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.3.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	901.511.000	137.434.724	15.24%

www.bandung.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	26.304.000	0	0.00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4.982.594.000	3.677.000	0.07%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	7.055.981.000	8.419.000	0.12%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	46.436.000	0	0.00%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	159.821.000	35.684.118	22.33%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	41.720.000	0	0.00%
8	Layanan Publik UPT yang Prima	384.431.000	101.454.780	26.39%
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	17.632.064.000	4.403.909.678	24.98%
TOTAL		31.230.862.000	4.690.579.300	15.02%

www.bandung.pom.go.id

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu: Layanan Publik UPT yang Prima dengan pagu sebesar Rp384.431.000,- dan realisasi sebesar Rp101.454.780,- dengan capaian 26.39%.
2) Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan pagu sebesar Rp17.632.064.000,- dan realisasi sebesar Rp4.403.909.678,- dengan capaian 24.98%.
3) Sasaran Kegiatan keenam yaitu: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp159.821.000,- dan realisasi sebesar Rp35.684.118,- dengan capaian 22.33%.
4) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp901.511.000,- dan realisasi sebesar Rp137.434.724,-, dengan capaian 15.24%.
5) Sasaran Kegiatan keempat yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp7.055.981.000,- dan realisasi sebesar Rp8.419.000,-, dengan capaian 0.12%.
6) Sasaran Kegiatan ketiga yaitu: Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp4.982.594.000,- dan realisasi sebesar Rp3.677.000,- dengan capaian 0.07%.
7) Sasaran Kegiatan kedua yaitu: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu sebesar Rp26.304.000,- dan realisasi sebesar Rp0,- dengan capaian 0%.
8) Sasaran Kegiatan kelima yaitu: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu sebesar Rp46.436.000,- dan realisasi sebesar Rp0,- dengan capaian 0%.
9) Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan pagu sebesar Rp41.720.000,- dan realisasi sebesar Rp0,- dengan capaian 0%.

www.bandung.pom.go.id

Pada triwulan I, RPD yang tercantum dalam Halaman I DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 22.753.845.926,-, maka deviasi sebesar 0 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.3.3
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TRIWULAN I TAHUN 2025

Bulan	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
Januari	3.2	3.2	0.00	Baik
Februari	7.41	7.41	0.00	Baik
Maret	15.02	15.02	0.00	Baik

Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

a. Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
b. Triwulan I, sebesar minimal 40 persen;
c. Triwulan II, sebesar minimal 60 persen; dan
d. Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.3.4
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

Target Realisasi Anggaran TW I	Realisasi Anggaran Triwulan I	Capaian
15%	15,02%	100.13%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih

www.bandung.pom.go.id

tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila IE ≥ SE: kegiatan efisien

Apabila IE < SE: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3.5
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	115.94%	6.80%	17.06	16.06	EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	12.81%	6.17%	2.07	1.07	EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65%	7.72%	15.25	14.25	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00%	7.75%	12.90	11.90	TIDAK EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.65%	7.75%	15.18	14.18	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.14%	21.32%	4.51	3.51	TIDAK EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	106.53%	28.31%	3.76	2.76	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	122.69%	28.31%	4.33	3.33	TIDAK EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.95%	27.69%	3.57	2.57	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	116.84%	35.33%	3.31	2.31	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	119.79%	27.28%	4.39	3.39	TIDAK EFISIEN
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi	129.91%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.80%	0.07%	1406.53	1405.53	TIDAK EFISIEN
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.28%	0.12%	811.94	810.94	TIDAK EFISIEN
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	100.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Jumlah desa pangan aman	133.33%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

www.bandung.pom.go.id

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	299.29%	22.33%	13.40	12.40	TIDAK EFISIEN
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	100.00%	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	#DIV/0!	26.39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	25.22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	#DIV/0!	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL		106.52%	15.02%	7.09	6.09	TIDAK EFISIEN

www.bandung.pom.go.id

Pada Triwulan I Tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori **Tidak Efisien (6.09).**

Sedangkat hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

www.bandung.pom.go.id

TABEL 3.3.6
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	41,720,000	0	0.00%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	514	39.24%	384,431,000	101,454,780	26.39%
3	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	533	0.71%	6,800,750,000	8,419,000	0.12%
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0.00%	439,467,000	16,123,300	3.67%
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	3	11.11%	16,177,000	0	0.00%
6	3165.CAB.002 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0.00%	752,705,000	3,677,000	0.49%
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	1	14.29%	159,821,000	35,684,118	22.33%
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	3	20.00%	88,624,000	0	0.00%
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	Lembaga	1	20.00%	125,757,000	0	0.00%
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	20.00%	24,673,000	0	0.00%
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	3	15.00%	46,436,000	0	0.00%
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	59	7.92%	151,676,000	11,720,972	7.73%
17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	118	6.68%	405,678,000	27,567,732	6.80%
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	38	12.75%	146,337,000	39,356,600	26.89%
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	9	25.00%	26,304,000	0	0.00%
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	129	12.96%	184,860,000	57,989,420	31.37%

www.bandung.pom.go.id

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	0	0.00%
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	Layanan	0	0.00%	1,098,000	0	0.00%
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0.00%	17,539,729,000	4,387,786,378	25.02%
TOTAL						31.230.862.000	4.690.579.300	15.02%

Pada Triwulan I Tahun 2025, BBPOM di Bandung melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT oleh UPT (TE=0.49). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada Triwulan I terlaksana secara tidak efisien (TE=-0.06).

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

www.bandung.pom.go.id

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
4.2 Saran

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Triwulan I Tahun 2025 mengukur pencapaian kinerja triwulan I tahun 2025 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2025, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 25 (dua puluh lima) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, 3 (tiga) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, 1 (satu) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 2 (dua) pencapaian sasaran kegiatan akan diukur pada akhir tahun. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 107,52% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat.
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 110,00% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di Jawa Barat.
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 103,80% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di dalam menguatkan lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT.
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 102,57% dengan kriteria sangat baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas KIE di Jawa Barat.
   - Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 110,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukan berhasilnya upaya Balai Besar POM di

www.bandung.pom.go.id

Bandung dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan di Jawa Barat.

- Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 110,00% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di Jawa Barat.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 100,00% dengan kriteria Baik, ini menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan layanan publik UPT yang prima.
- Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan belum dilakukan pengukuran, pengukuran akan dilakukan pada akhir tahun sehingga belum dapat menunjukan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan unit organisasi yang optimal.

3. Pada triwulan I tahun 2025, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 25 (dua puluh lima) didapatkan hasil Tidak Efisien sebesar (TE = 6,09).

4.2 SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran kegiatan pada triwulan I tahun 2025 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada periode selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandung, antara lain :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk meningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat, melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi instruksi presiden no, 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, melalui peningkatan kualitas reviu perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

www.bandung.pom.go.id

3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindaklanjut dari implementasi efisiensi anggaran Tahun 2025
4. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tatakelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
5. Melakukan penyesuaian dalam metode pencapaian kinerja pengawasan, baik itu pre market, post market, penyidikan dan pemberdayaan masyarakat, dengan manual Indikator Kinerja Utama sesuai Renscana Strategis Tahun 2025-2029.
6. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.

www.bandung.pom.go.id

BADAN POM

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2025
2. Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja TA 2025
4. Pengukuran Kinerja Triwulan I TA 2025
5. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I TA 2025
6. Capaian Output Triwulan I TA 2025

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 0224230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di BAndung pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.09.24.605 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 %
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85 %
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,50
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,85
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,75
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

I MADE BAGUS GERAMETTA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: I MADE BAGUS GERAMETTA
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Bandung	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
I MADE BAGUS GERAMETTA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7 nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85 persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72 persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 persen
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.5 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83.1 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 66,390,943,000 (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	46,635,378,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,755,565,000

Bandung, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	1,492,536,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	99,200,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	405,173,200
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	62,112,800
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	155,282,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	64,683,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	320,563,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	305,724,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	91.75	642,279,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	417,745,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	83.48	44,945,000
2.	02 - Meningkatnya	01 - Persentase cakupan sarana	0	4.8	11	17.5	23.8	30	36.5	42.9	49	52.4	55	57	58,922,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			79	79	79	80	80	80	81	81	81	81.7	12,603,107,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	86.94	22,383,776,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	10	20	25	30	35	40	50	60	70	85	17	558,912,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	10	15	20	40	45	60	75	80	90	95	6	929,917,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	20	25	40	50	60	70	80	85	90	1	166,002,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	15	20	30	40	45	50	65	70	75	85	109,594,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14	16	17	18	25	26	28	35	40	50	54	72	866,166,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	283,012,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	829,727,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.5	20,247,184,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												83.1	3,084,740,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	100,140,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.95	159,501,000
														Total	66,390,943,000

Bandung, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

Capaian RAPK BBPOM di Bandung
Bulan Januari 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Januari	Realisasi s.d Januari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25			100.00	115.94	115.94
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-					Dihitung pada Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00				100.00	117.65	117.65
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Januari	Realisasi s.d Januari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2025
	pengawasan oleh lintas sektor		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00			93.75	106.53	106.53
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00			100.00	125.00	125.00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75			88.06	95.97	95.97
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	83.48	83.48			100.00	119.79	119.79

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Januari	Realisasi s.d Januari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2025
			sesuai ketentuan							
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00			0.00	0.00	0.00
		16	Jumlah desa pangan aman	6	0.00			0.00	0.00	0.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00			0.00	0.00	0.00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	85.00	0.00			0.00	0.00	0.00

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Januari	Realisasi s.d Januari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2025
	standar keamanan dan mutu		sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan							
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	14.00			40.25	287.5	55.90
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00			50.00	100.00	55.56
10	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-			-		Dihitung pada Akhir Tahun

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Januari	Realisasi s.d Januari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Januari	%Capaian thd Target 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun

Bandung, 10 April 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG ★ BADAN POM ★

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Capaian RAPK BBPOM di Bandung
Bulan Februari 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Februari	Realisasi s.d Februari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25			100.00	115.94	115.94
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-					Dihitung pada Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00				100.00	117.65	117.65
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Februari	Realisasi s.d Februari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2025
	pengawasan oleh lintas sektor		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00			93.75	106.53	106.53
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00			100.00	125.00	125.00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75			88.85	96.84	96.84
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			99.44	116.99	116.99
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	83.48	83.48			100.00	119.79	119.79

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Februari	Realisasi s.d Februari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2025
			sesuai ketentuan							
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	4.80			0.00	0.00	0.00
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94				89.92	103.43	103.43
		15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	10.00			0.00	0.00	0.00
		16	Jumlah desa pangan aman	6	10.00			0.00	0.00	0.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10.00			0.00	0.00	0.00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	85.00	10.00			10.00	100.00	11.76

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Februari	Realisasi s.d Februari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2025
	standar keamanan dan mutu		sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan							
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	16.00			43.25	270.31	60.07
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00			50.00	100.00	55.56
10	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-			-		Dihitung pada Akhir Tahun

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Februari	Realisasi s.d Februari				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Februari	%Capaian thd Target 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun

Bandung, 10 April 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BADAN POM DI BANDUNG

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Capaian RAPK BBPOM di Bandung
Bulan Maret 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25			100.00	115.94	115.94
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	-					Dihitung pada Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			100.00	117.65	117.65
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00			100.00	100.00	100.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00				100.00	117.65	117.65
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	85.00	85.00			81.72	96.14	96.14

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2025
	pengawasan oleh lintas sektor		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder							
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00			93.75	106.53	106.53
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00			98.15	122.69	122.69
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75			90.79	98.95	98.95
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00			99.31	116.84	116.84
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi	83.48	83.48			100.00	119.79	119.79

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2025
			sesuai ketentuan							
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	11.00			14.29	129.87	25.06
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70	79.00			82.00	103.80	100.37
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94			87.18	100.28	100.28
		15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20.00			20.00	100.00	20.00
		16	Jumlah desa pangan aman	6	15.00			20.00	133.33	20.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20.00			20.00	100.00	20.00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	85.00	15.00			16.67	111.13	19.61

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2025
	standar keamanan dan mutu		sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan							
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	17.00			45.50	267.65	63.19
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00			50.00	100.00	55.56
10	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	-			-	-	Dihitung pada TW II
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	-			-		Dihitung pada Akhir Tahun

No	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2025	Target Maret	Realisasi s.d Maret				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target Maret	%Capaian thd Target 2025
		25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	-			-	-	Dihitung pada Akhir Tahun

Bandung, 10 April 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG BADAN POM

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada hari Selasa tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat Kantor Balai Besar POM di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
   NIP : 19690718 199603 1 001
   Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

2. Nama : Dwi Kurniasari, S.Si., Apt
   NIP : 19810108 200604 2 004
   Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Bandung

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung periode Januari sampai dengan bulan Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan I

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	41,720,000	0	0.00%
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	514	39.24%	384,431,000	101,454,780	26.39%
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	533	0.71%	6,800,750,000	8,419,000	0.12%
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0.00%	439,467,000	16,123,300	3.67%
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	3	11.11%	16,177,000	0	0.00%
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0.00%	752,705,000	3,677,000	0.49%

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2025	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	1	14.29%	159,821,000	35,684,118	22.33%
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	3	20.00%	88,624,000	0	0.00%
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	Lembaga	1	20.00%	125,757,000	0	0.00%
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	20.00%	24,673,000	0	0.00%
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	3	15.00%	46,436,000	0	0.00%
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	59	7.92%	151,676,000	11,720,972	7.73%
17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	118	6.68%	405,678,000	27,567,732	6.80%
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	38	12.75%	146,337,000	39,356,600	26.89%
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	9	25.00%	26,304,000	0	0.00%
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	129	12.96%	184,860,000	57,989,420	31.37%
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	0	0.00%
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	Layanan	0	0.00%	1,098,000	0	0.00%
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0.00%	17,539,729,000	4,387,786,378	25.02%
	TOTAL					**31,230,862,000**	**4,690,579,300**	**15.02%**

2. Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	100	115.94%	405,678,000	27,567,732	**6.80%**
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	3.33	12.81%	12,960,000	800,000	**6.17%**
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65%	98,736,400	7,618,632	**7.72%**
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100.00%	15,125,600	1,172,097	**7.75%**
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65%	37,814,000	2,930,243	**7.75%**
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	81.72	96.14%	16,004,500	3,412,364	**21.32%**
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	93.75	106.53%	69,266,250	19,608,725	**28.31%**
		8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	98.15	122.69%	69,266,250	19,608,725	**28.31%**
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	90.79	98.95%	97,090,000	26,883,353	**27.69%**
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99.31	116.84%	76,090,000	26,883,353	**35.33%**
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	100	119.79%	3,480,000	949,500	**27.28%**
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11	14.29	129.91%	26,304,000	-	**0.00%**
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79	82	103.80%	4,982,594,000	3,677,000	**0.07%**
6	Meningkatnya efektivitas KIE di	14 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	86.94	87.18	100.28%	6,816,927,000	8,419,000	**0.12%**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
	masing-masing wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung						
		15 Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20	20	100.00%	82,849,600	-	0.00%
		16 Jumlah desa pangan aman	15	20	133.33%	128,644,200	-	0.00%
		17 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	100.00%	27,560,200	-	0.00%
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15	15	100.00%	46,436,000	-	0.00%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	17	50.88	299.29%	159,821,000	35,684,118	22.33%
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20 Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	50	50	100.00%	41,720,000	-	0.00%
10	Layanan Publik UPT yang Prima	21 Indeks Pelayanan Publik UPT	0		#DIV/0!	384,431,000	101,454,780	26.39%
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22 Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	17,462,639,000	4,403,909,678	25.22%
		23 Nilai AKIP Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	65,757,000	-	0.00%
		24 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	1,098,000	-	0.00%
		25 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung			#DIV/0!	102,570,000	-	0.00%
	TOTAL					31,230,862,000	4,690,579,300	15.02%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 April 2025

Kepala Bagian Tata Usaha

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt,

Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Reallisasi anggaran dan capaian output dibandingkan target dan nilai efisiensi sampai dengan Triwulan I 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	KET
a	b	c		d	e = (d/c x 100)	f	g	h = (g/f x 100)	i = (e/h)	j = i-1	
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	41,720,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	Keputusan	514	39.24%	384,431,000	101,454,780	26.39%	1.49	0.49	Efisen
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	Orang	533	0.71%	6,800,750,000	8,419,000	0.12%	5.72	4.72	Tidak Efisen
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0.00%	439,467,000	16,123,300	3.67%	0.00	-1.00	Tidak Efisien
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	3	11.11%	16,177,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Unit	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	Paket	0	0.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	0.00%	752,705,000	3,677,000	0.49%	0.00	-1.00	Tidak Efisien
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	Perkara	1	14.29%	159,821,000	35,684,118	22.33%	0.64	-0.36	Tidak Efisen
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	3	20.00%	88,624,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	Lembaga	1	20.00%	125,757,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	Lembaga	0	20.00%	24,673,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	90	100.00%	12,960,000	800,000	6.17%	16.20	15.20	Tidak Efisien
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	UMKM	3	15.00%	46,436,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	59	7.92%	151,676,000	11,720,972	7.73%	1.02	0.02	Efisien

17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	Sampel	118	6.68%	405,678,000	27,567,732	6.80%	0.98	-0.02	Tidak Efisen
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	Sarana	38	12.75%	146,337,000	39,356,600	26.89%	0.47	-0.53	Tidak Efisen
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	Sarana	9	25.00%	26,304,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisen
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	Sarana	129	12.96%	184,860,000	57,989,420	31.37%	0.41	-0.59	Tidak Efisien
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	3,881,659,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	Layanan	0	0.00%	1,098,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0.00%	17,539,729,000	4,387,786,378	25.02%	0.00	-1.00	Tidak Efisien
Total					**14.22%**	**31,230,862,000**	**4,690,579,300**	**15.02%**	0.94	-0.05	Tidak Efisien

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		Volume				Anggaran				
		Target 2025	Target TW I	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	CAPAIAN TE
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	100	115.94%	405,678,000	27,567,732	6.80%	17.06	16.06	TIDAK EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	26	3.33	12.81%	12,960,000	800,000	6.17%	2.07	1.07	TIDAK EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	98,736,400	7,618,632	7.72%	15.25	14.25	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100.00%	15,125,600	1,172,097	7.75%	12.90	11.90	TIDAK EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65%	37,814,000	2,930,243	7.75%	15.18	14.18	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85	81.72	96.14%	16,004,500	3,412,364	21.32%	4.51	3.51	TIDAK EFISIEN

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	93.75	106.53%	69,266,250	19,608,725	28.31%	3.76	2.76	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	98.15	122.69%	69,266,250	19,608,725	28.31%	4.33	3.33	TIDAK EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	90.79	98.95%	97,090,000	26,883,353	27.69%	3.57	2.57	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	99.31	116.84%	76,090,000	26,883,353	35.33%	3.31	2.31	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	100	119.79%	3,480,000	949,500	27.28%	4.39	3.39	TIDAK EFISIEN
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	11	14.29	129.91%	26,304,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	79	82	103.80%	4,982,594,000	3,677,000	0.07%	1406.53	1405.53	TIDAK EFISIEN
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	86.94	87.18	100.28%	6,816,927,000	8,419,000	0.12%	811.94	810.94	TIDAK EFISIEN
15	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	20	100.00%	82,849,600	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
16	Jumlah desa pangan aman	6	15	20	133.33%	128,644,200	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20	20	100.00%	27,560,200	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85	15	15	100.00%	46,436,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN

19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	17	50.88	299.29%	159,821,000	35,684,118	22.33%	13.40	12.40	TIDAK EFISIEN
20	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	90	50	50	100.00%	41,720,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	0		#DIV/0!	384,431,000	101,454,780	26.39%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
22	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.5			#DIV/0!	17,462,639,000	4,403,909,678	25.22%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
23	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1			#DIV/0!	65,757,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5			#DIV/0!	1,098,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95			#DIV/0!	102,570,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
	TOTAL				**#DIV/0!**	**31,230,862,000**	**4,690,579,300**	**15.02%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**TIDAK EFISIEN**

A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Program?kegiatan/Output	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3	
1	**3165.AEA.001** – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	1	1	100	2	2	100	3	3	100	41,720,000	-	0.00%	-	0.16%	0	0.00%
2	**3165.BAH.001** Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1310	188	188	100	356	356	100	451	514	113,9689579	384,431,000	-	0.00%	23,595,857	6,14%	101,454,780	26.39%
3	**3165.BDC.001** KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	75335	133	133	100	133	133	100	533	533	100	6,800,750,000	1,710,000	0.03%	8,419,000	0,12%	8,419,000	0.12%
4	**3165.BKB.001** Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	439,467,000	-	0.00%	7,943,500	1,81%	16,123,300	3.67%
5	**3165.BMB.001** Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	1	1	100	2	2	100	3	3	100	16,177,000	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
6	**3165.CAB.002** Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
7	**3165.CAN.001** Perangkat pengolah data dan komunikasi	12	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
8	**3165.CBV.001** Prasarana Bidang Kesehatan	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
9	**3165.PDD.001** Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	752,705,000	-	0.00%	1,497,000	0.06%	3,677,000	0.49%
10	**3165.QCD.U02** Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	7	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1	1	100	159,821,000	-	0.00%	4,120,000	0,48%	35,684,118	22.33%
11	**3165.QDB.001** Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	20	3	15	88,624,000	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
12	**3165.QDB.002** Desa Pangan Aman	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	15	1	6,666666667	125,757,000	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
13	**3165.QDB.003** Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	20	0	0	24,673,000	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
14	**3165.QDC.001** Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	90	90	100	12,960,000	-	0.03%	-	0.03%	800	6.17%
15	**3165.QDG.001** UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	15	3	20	46,436,000	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%
16	**3165.QIA.001** Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	55	55	100	59	59	100	59	59	100	151,676,000	-	0.00%	10,924,072	1,75%	11,720,972	7.73%
17	**3165.QIA.002** Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1766	77	77	100	77	77	100	118	118	100	405,678,000	-	0.00%	640,000	0.04%	27,567,732	6.80%
18	**3165.QIC.001** Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	298	15	15	100	21	21	100	37	38	102,7027027	146,337,000	-	0.00%	-	0.00%	39,356,600	26.89%
19	**3165.QIC.003** Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	36	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	9	9	100	26,304,000	-	0.00%	5,326,000	0,83%	0	0.00%
20	**3165.QIC.004** Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	995	65	66	101,5384615	89	90	101,1235955	116	129	111,2068966	184,860,000	-	0.00%	-	0.00%	57,989,420	31.37%
21	**3165.RAB.001** Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3,881,659,000	-	0.00%	30,665,214	2,65%	0	0.00%
22	**6384.EBA.956** Layanan BMN	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1,098,000	-	0,00%	-	0,00%	0	0.00%
23	**6384.EBA.994** Layanan Perkantoran	1	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	17,539,729,000	997,751,371	5,69%	2,221,572,203	12,67%	4,387,786,378	25.02%

B. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	86.25	100.00	115.94	86.25	100.00	115.94	86.25	100.00	115.94	405,678,000	-	0.00%	640,000	0.16%	27,567,732	6.80%
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!		0.00		12,960,000	-	0.00%	-	0.00%	800	6.17%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00	117.65	85.00	100.00	117.65	85.00	100.00	117.65	98,736,400	-	0.00%	7,100,647	7.19%	7,618,632	7.72%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15,125,600	-	0.00%	1,092,407	7.22%	1,172,097	7.75%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00		100.00	#DIV/0!	85.00	100.00	117.65	85.00	100.00	117.65	37,814,000	-	0.00%	2,731,018	7.22%	2,930,243	7.75%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.00	100.00	117.65	85.00	100.00	117.65	85.00	81.72	96.14	16,004,500	-	0.00%	1,255,214	7.84%	3,412,364	21.32%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.00	88.00%	93.75%	106.53	88.00%	93.75%	106.53	88.00%	93.75%	106.53	69,266,250	-	0.00%	2,663,000	3.84%	19,608,725	28.31%
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	100.00	125.00	80.00	100.00	125.00	80.00	98.15	122.69	69,266,250	-	0.00%	2,663,000	3.84%	19,608,725	28.31%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.75	91.75	88.06%	95.97%	91.75	88.85%	96.84%	91.75	90.79	98.95	97,090,000	-	0.00%	14,230,250	14.66%	26,883,353	27.69%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	85.00	100.00%	117.65%	85.00	99.44%	116.99%	85.00	99.31	116.84	76,090,000	-	0.00%	14,230,250	18.70%	26,883,353	35.33%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.48	83.48	100.00	119.79	83.48	100.00	119.79	83.48	100.00	119.79	3,480,000	-	0.00%	949,5	27.28%	949,5	27.28%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4.80	0.00	0.00	11.00	14.29	129.87	26,304,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.70			#DIV/0!			#DIV/0!	79.00	82.00	103.80	4,982,594,000	-	0.00%	1,497,000	0.03%	3,677,000	0.07%
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94		0.00	#DIV/0!		89.92	#DIV/0!	86.94	87.18	100.28	6,816,927,000	1,710,000	0.03%	8,419,000	0.12%	8,419,000	0.12%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	0.00	0.00	#DIV/0!	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	82,849,600	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		Jumlah desa pangan aman	6	0.00	0.00	#DIV/0!	10.00	0.00	0.00	15.00	20.00	133.33	128,644,200	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0.00	0.00	#DIV/0!	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	27,560,200	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3	
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10.00	10.00	100.00	15.00	16.67	111.11	46,436,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72.00	14.00	44.71	319.33	16.00	48.24	301.47	17.00	50.88	299.31	159,821,000	-	0.00%	4,120,000	2.58%	35,684,118	22.33%
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	41,720,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		384,431,000	-	0.00%	23,595,857	6.14%	101,454,780	26.39%
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.50			#DIV/0!			#DIV/0!				17,462,639,000	997,751,371	5.71%	2,229,515,703	12.77%	4,403,909,678	25.22%
		Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83.1			#DIV/0!			#DIV/0!				65,757,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5			#DIV/0!			#DIV/0!				1,098,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95			#DIV/0!			#DIV/0!				102,570,000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	095	063	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

tanggal cetak : 14-04-25 01:22:04 oleh : 432753

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG

DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	AEA	001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	283,012,000	0	14	kegiatan	3	21.42	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	3	21.42	100
2	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	BAH	001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	829,727,000	101,454,780	1310	dokumen	514	39.23	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	451	34.42	100
3	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	BDC	001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	22,282,048,000	8,419,000	75335	Orang	533	.71	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	533	.71	100
4	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	BKB	001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	3,686,000,000	16,123,300	1	laporan	0	25	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Stabilized	0	25	100
5	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	BMB	001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	101,728,000	0	27	kegiatan	3	11.1	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	3	11.1	100
6	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	CAB	001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	50,000,000	0	1	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	100
7	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	CAN	001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,000,000	0	12	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	100
8	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	CBV	001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4,342,350,000	0	4	Unit	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	100

tanggal cetak : 14-04-25 01:22:24 oleh : 432753

9	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	PDD	001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2,646,701,000	3,677,000	1	Lembaga	0	3.37	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	0	3.26	100
10	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QCD	U02	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDUNG	866,166,000	35,684,118	7	Perkara	1	14.29	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	14.28	100
11	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QDB	001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	586,716,000	0	17	Lembaga	3	20	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	3	20	100
12	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QDB	002	Desa Pangan Aman	916,015,000	0	6	Lembaga	1	20	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	20	100
13	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QDB	003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	152,100,000	0	1	Lembaga	0	20	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	0	20	100
14	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QDC	001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	99,200,000	800,000	90	Orang	90	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	90	100	100
15	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QDG	001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	109,594,000	0	26	UMKM	3	16.67	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	3	15	100
16	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QIA	001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	622,568,000	11,720,972	745	Produk	59	7.92	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	59	7.92	100
17	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QIA	002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,492,536,000	27,567,732	1766	Produk	118	6.68	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	118	6.68	100

18	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QIC	001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	640,815,000	39,356,600	298	Lembaga	37	12.41	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	37	12.41	100
19	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QIC	003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	58,922,000	0	36	Lembaga	9	25	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	9	25	100
20	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	QIC	004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,155,124,000	57,989,420	995	Lembaga	129	12.96	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	114	11.45	100
21	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	DR	3165	RAB	001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5,265,826,000	0	1	Paket	0	0	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	0	0	100
22	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	WA	6384	EBA	956	Layanan BMN	8,000,000	0	1	Layanan	0	25	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	0	25	100
23	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	095	3	WA	6384	EBA	994	Layanan Perkantoran	20,095,795,000	4,387,786,378	1	Layanan	0	25	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	0	25	100
Total Nilai																						2,300.00
Jumlah Output																						23

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOTA DINAS

NOMOR : PR.08.02.8A.04.25.33

Yth	:	Seluruh Ketua Tim Kerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025
Dari	:	Kepala Balai Besar POM di Bandung
Hal	:	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I TA 2025
Tanggal	:	8 April 2025

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I Tahun Anggaran 2025 maka kami mengundang seluruh Ketua Tim Balai Besar POM di Bandung dan 1 - 2 peserta anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 April 2025

Pukul : 09.00 s.d. selesai

Tempat : Ruang BIC Gedung A Lantai 3

Diharapkan masing-masing ketua tim menyampaikan paparan sebagai berikut :

A. Tim Manajemen Kinerja :
   1. Capaian Output
   2. Capaian Kinerja IKU
   3. Realisasi Anggaran

B. Ketua Tim :
   1. Tindak Lanjut rekomendasi sebelumnya
   2. Kendala dan permasalahan
   3. Manajemen Risiko

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Notulen Rapat

Materi Rapat	: Rapat Monev TW I 2025
Waktu Pelaksanaan	: Kamis, 10 April 2025 Pukul 09.00 – Selesai
Tempat	: Ruang BIC BBPOM di Bandung
Pimpinan Rapat	: Kepala BBPOM Bandung
Peserta Rapat	: Kepala Balai Besar POM di Bandung, Seluruh Ketua tim Kerja, tim Perencana/Monev.

Pembukaan dan Arahan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung, Drs. I Made Bagus Geramettа Apt. :

1. Rapat monev triwulan I 2025 merupakan rapat monev pert
2. Efisiensi penghematan dan revisi berulang, pembukaan blokir untuk di manfaatkan dan melakukan penyesuaian Kembali terhadap renlak di 2025.

Paparan Capaian Kinerja Triwulan I :

1. Capaian anggaran pada Triwulan I terhadap pagu awal 7,07%, terhadap pagu blokir 15,02%. Sedangkan Capaian anggaran per 10 April 2025 terhadap pagu awal 8.33%, terhadap pagu blokir 17,71%.
2. Capaian anggaran untuk setiap RO masih terdapat beberapa RO yang belum ada realisasi karena ada penyesuaian kegiatan dan pemblokiran penuh.
3. Nilai Kinerja Anggaran di Tahun 2025 berupa Indeks 5 yaitu rentang nilai 90-100. Pada Triwulan I nilai IKPA diberikan nilai maksimal 100 karena ada beberapa kebijakan terutama adanya revisi berulang.
4. Realisasi RPD per fungsi Infokom masih rendah karena adanya KIE di akhir Maret, sehingga pertanggungjawaban baru di Bulan April.
5. Capaian Output pads beberapa RO masih banyak yang tidak efisien karen belum ada realisasi anggaran dan realisasi fisik belum menyesuaikan terhadap pagu blokir sehingga capaian masih kecil.
6. Rencana Tindak Lanjut yaitu Penyesuaian target POA keuangan, optimalisasi pemanfaaatan simangga, penyampaian Ptj sesuai timeline, pelaksanaan kontrak di TW 2, pelaksanaan UP/TUP sesuai timeline dan realisasi 100%, serta penyesuaian target di TW 2.
7. Sesuai dengan capaian, pemberian reward dan punishment telah dihitung dengan proporsi NPSS
8. Hasil Capaian kinerja terlampir.

Tanggapan Kepala Balai Besar POM di Bandung :

1. Terhadap capaian yang tidak efisien, perlu di lakukan penyesuaian dan inisiatif untuk meningkatkan efisien sesuai dengan pedoman.
2. Perubahan DO untuk penindakan dapat disesuaikan dengan meminta arahan dari unit pengampu Deputi 4 agar capaian lebih baik.
3. Di triwulan I minimal realisasi anggaran 15%, sehingga sudah tercapai. Namun dibandingkan dengan pagu awal belum tercapai.
4. Infokom mempunyai tantangan berat terutama untuk pelaksanaan KIE Tomas karena adanya anggota DPR baru di komisi 9, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih intens dan berpegang terhadap aturan yang berlaku.
5. Seluruh pegawai diharapkan memahami cara perhitungan IKU sehingga lebih aware terhadap rencana untuk pelaksanaan IKU.

6. Advokasi untuk kegiatan Pro PN, segera dilaksanakan.
7. Algoritma kepemimpinan,
8. AOC, madya sebagai ketua kegiatan, aoc sebagai pelaksana dan membantu sehingga dapat digunakan untuk pelatihan kepemimpinan
9. Untuk capaian di bulan Maret TW 1 kita jadikan sebagai evaluasi sehingga pada bulan April dan seterusnya untuk di tingkatkan dan meningkatkan NPSS untuk penilaian WBBM.
10. BPK memninta data LTGA, Bandung sudah mengirim, dan rencana BPK akan ke u1 hari, mohon untuk disiapkan seluruh data.
11. Podcast dan Agenda AOC untuk diaktifkan Kembali.
12. Pa Yaya : KIE => revisi anggaran yg buka tutup, kesepakatan pusat dg Tomas dan belum ada juknis resminya, ; Anggaran KIE apabilan dengan transport 150.000 akan menghilangkan kegiatan lain di BDC, sehingga hanya cukup untuk KIE Tomas. MPP tidak ada anggaran transport sehingga Bekasi tidak bisa dilaksanakan, untuk Bandung Raya dengan WFH. Akan menyisihkan anggaran dalam kota, namun jangan dipotong uang makan. Atau menungggu sisa dari KIE. Survei KIE masih dalam pengembangan dari pusat, survei nya benyak pertanyaan dan lembar nya, sehingga perlu di efiensi kan untuk penggandaan survei melalui qrcode, namun KIE tomas banyak yang belun paham teknologi. ProPN: pergantian pimpinan daerah. Pimpinan baru kurang suka audiensi, sehingga bisa langsung ke Sekda. Dari Infokom akan menyampaikan program-program advokasi terlebih dahulu.
    Tanggapan Pak Gera : MPP diatur Kembali menyesuaikan dengan anggaran. Penggandaan survei dilakukan inovasi menggunakan qrcode, karena Masyarakat udah memiliki HP sehingga bisa diajarkan.
13. Bu Leni : karena adanya anggaran yang dibuka seluruhnya, ada beberapa kegiatan yang akan di lakukan dan penyesuaian Renlak dan perlu revisi MPH. Penyampaian kinerja berdasarkan SIPT. Jaringan tidak stabil saat seluruh pegawai datang ke kantor/WFO. Sehingga terkendala saat penginputan SIPT. Pada bidang inspeksi masih kekurangan untuk scanner. Adanya manual IKU dan DO yang cukup rumit sehingga perlu penyesuaian dan tools perhitungan. Perlu adanya revisi anggaran karena adanya pembukaan blokir.
    Tanggapan Bu Dwi : revisi MPH akan di fasilitasi setelah selesai penilaian TW 1. Mohon disiapkan data dukungnya. Pengembangan SPBE belum dilakukan karena belum ada rencana dan roadmap nya, akan segera dilaksanakan. Jaringan internet akan dimonitoring lagi. Layanan TU care terintegrasi akan difasitasi dan terdokumentasi. Kebutuhan Sarpras dapat difasilitasi namun tidak belanja modal. Pengembangan aplikasi satupom jabar atau galura difasilitasi tim IT namun disiapkan konsep nya secara final.
    Tanggapan Pak Jajat : Usulan penyesuaian target dan RPD dibuka sampai tanggal 15 April. Revisi POK akan dibuka pada minggu depan.
    Tanggapan Kabalai : Inspektur yang ada dimanfaatkan untuk pencapaian target selain dari Pemeriksaan. Pengukuran kinerja sesuai dengan DO dapat disampaikan ke unit pengampu untuk kendala dan permasalahanya. Terkait jaringan internet di ditugaskan tim IT piket setiap minggu untuk penanggungjawab. Scanner bisa beli dengan ekstrakomp namun harus dirawat dengan baik. Terkait anggaran dapat dimanfaatkan untuk kegitan lain.
14. Bu Rera : Adanya pembukaan anggaran perlu melakukan strategi baru, Kerjasama dengan tim pengadaan agar realisasi juga lebih cepat. Untuk belanja modal alat Lab Sudah berproses senilai 3,3M dan alat lab lainnya akan berproses. Untuk Reagen dan media aka nada rencana konsolidasi namun belum ada SK, apakah dibolehkan beli non PDN? Terkait ATK apakah bisa diadakan? Timeline pengujian 15-20 Hr. rata-rata diatas 20hr untuk semua komoditi, di pengujian cukup banyak penyesuaian penggunaan alat dll, akan disesuaikan lebih. Apakah target di TW 2 boleh dibawah 50% dan di alihkan ke TW

berikutnya. Dari tim pengujian akan memfasilitasi kebutuhan pegawai untuk ditugaskan di fungsi lain.
Tanggapan Bu Dwi : ATK dapat di lakukan dengan akun habis pakai, namun terbatas dan dimonitoring untuk digunakan tahun berjalan.
Tanggapan Pak Agung : Konsolidasi sampai saat ini blm ada, yang masuk konsolidasi hanya methanol dan acetonitrile, dapat dilaksanakan tanpa menunggu konsolidasi. Tetap kalua bisa yang PDN karena belum ada surat resmi nya.
Tanggapan Pak Gera : untuk timeline 15-20 hr kerja tetap dilaksanakan semampunya. Terkait konsolidasi karena adanya perbedaan harga yang tidak konsisten. Dapat diatur ulang untuk menajemen pelaksanaan kegiatan agar seluruh target tercapai. Pengadaan reagen agar di percepat.

15. Pak Heri : terkait efisiensi adanya pemeriksaan daring, potensi ketidaktepatan sangat tinggi, lebih baik pemeriksaan secara luring. Inovasi sudah dimonitoring namun terkendala keberlanjutannya karena perbedaan PIC.
    Tanggapan Pak Gera : dibuatkan daftar aplikasi dan dibahas untuk PIC masing-masing aplikasi.
16. Pak Ayi : terkait perhitungan capaian diatas 200% karena adanya formula baru. Penindakan menghadapi pra peradilan, adanya gugatan pra peradilan yang menyita waktu dan tenaga, adanya pembukaan blokir untuk di gunakan.
    Tanggapan Pak Gera : untuk pra peradilan untuk disiapkan strategi berkoordinasi dengan Hukor dengan biaya masing-masing. Perhitungan capaian untuk di pelajari lagi dan diusulkan perubahan target.

Hasil Rapat:

1. Penutupan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Bandung, 10 April 2025
Mengetahui
Kepala Balai Besar POM di Bandung

Notulen

Rio Sudarman, S.E

Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Dokumentasi Rapat









DAFTAR HADIR KEGIATAN
BBPOM DI BANDUNG
TANGGAL 10 April 2025

NO	NAMA	Jenis Kelamin (L/P)	Instansi	TANDA TANGAN
1	Dr. I Made Bagus Goramotta, Apt	L	Ka BBPOM di Bandung.	1
2	Dwi Kurnasari, S.Si., Apt	P	BBPOM di Bdg	2
3	Sri Prihatiny	P	BBPOM di Bdg	3
4	Fany Nurmalasari	P	BBPOM di Bandung	4
5	meliza miranda w.	P	BBPOM di Bandung	5
6	Dwie Astrini	P	BBPOM di Bandung	6
7	Rera. R.	P	BBPOM di Bandung	7
8	Siti Aminah	P	BBPOM di Bandung	8
9	Afi. Kampus-SRL	L	BBPOM di Bandung	9
10	Leni Maryati	P	BBPOM di Bandung	10
11	Fibria Rospawati	P	BBPOM di Bandung	11
12	Fitria Augustin	P	BBPOM di Bandung	12
13	Heri Kusnanto	L	BBPOM di Bandung.	13
14	Endang Yuya	L	BBPOM di Bandung	14
15	Jajat Fikri P	L	BBPOM di Bandung	15
16	Rio Sudarman	L	BBPOM di Bandung	16